

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

Hak-Hak Minoritas dalam *Islam*

Permata Terpendam dari Fiqh Siyasah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

HAK-HAK MINORITAS DALAM ISLAM

Permata Terpendam dari *Fiqh Siyāsah*

Penulis:

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.

Editor:

Ridho Rokamah, S.Ag, M.S.I

Pustaka Radja

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

Hak-Hak Minoritas dalam Islam, Permata Terpendam dari Fiqh Siyasah

© DR H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. AG

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Juni 2013

Jl. Tales II No. 1 Surabaya.

Tlp. 031-72001887, 081249995403

(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.

Editor : Ridho Rokamah, S.Ag, M.S.I

Layout dan desain sampul: Salsabila *Creative*

Hak cipta 2013, pada penulis.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-7567-63-4

viii+136; 12 cm x 18 cm

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pembicaraan tentang kerukunan hidup antar umat beragama bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagai sebuah agama hukum, Islam sejak semula tidak melewatkan membekali pemeluknya dengan norma tingkah laku dalam pergaulan hidup bersama dengan pemeluk agama lain. Di antara norma tersebut adalah tentang tingkah laku sebagai penguasa negara dalam keadaan sebagian rakyatnya adalah non-Muslim. Norma ini mengikat semua kaum Muslimin, baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa, yang tidak dibangun di atas keyakinan akan kebenaran Islam di atas agama lain – keyakinan standar kaum Muslimin¹ - melainkan atas dasar bahwa kemajemukan masyarakat adalah kehendak Tuhan.²

Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di dalam

¹ Lihat misalnya Surat 3 Āli 'Imrān: 19, 85.

² Lihat misalnya Surat 5 al-Mā'idah: 48; Surat 6 al-An'ām: 107; Surat 10 Yūnus: 99; Surat 16 al-Naḥl: 9, 93.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

berbagai literatur lama bagaikan "mengenang kembali" periode kesibukan pada ahli *fiqh* memberikan panduan kepada para penguasa Muslim. Para ahli fiqh itu umumnya adalah para pemikir "swasta" yang terus berusaha menjaga agar penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam ideal Islam, walau sangat sering mereka ditinggalkan para penguasa yang bersepak terjang semata berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Menata kembali sikap-sikap ini barangkali adalah hal yang selalu harus dibuka kemungkinannya di seluruh sejarah peradaban kaum Muslimin dalam kaitannya dengan bagaimana Muslim bergaul dengan mereka yang tidak seiman. Buku ini hanyalah sedikit sumbangan untuk tujuan seperti itu.

Ponorogo, 17 Mei 2013

AMS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ vii

BAB I

PENDAHULUAN ~ 1

BAB II

MASYARAKAT ATAU NEGARA? ~ 5

A. Perjanjian 'Aqabah ~ 7

B. Hijrah dan Kelahiran Negara Baru ~ 10

C. Islam, Teokrasi dan Demokrasi ~ 13

D. Sumber-sumber Perundang-Undangan Negara Islam
~ 21

E. Prinsip-prinsip Perundang-undangan Negara di dalam
Islam ~ 30

F. Tujuan Negara dalam Islam ~ 33

BAB III

PENGGOLONGAN PENDUDUK NEGARA DI DALAM ISLAM ~ 37

A. Pembagian kawasan dunia ~37

B. Warga Negara ~ 44

C. Orang Asing ~ 53

D. Islam dan Teori Kewarganegaraan ~ 58

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

E. Perkawinan, Keturunan dan Status Kewarganegaraan
~ 60

BAB IV

PENDUDUK NON-MUSLIM DI DALAM NEGARA ISLAM ~ 65

- A. Tinjauan Umum Tentang Sikap Islam Terhadap Non-Muslim ~ 65
- B. Kewajiban-kewajiban Penduduk Non-Muslim ~ 72
- C. Gugurnya *Jizyah* ~ 81
- D. Hak dan Kebebasan Dasar Penduduk non-Muslim ~ 91

BAB V

KESIMPULAN ~ 129

DAFTAR PUSTAKA ~ 131

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam keadaan perang maupun damai telah diatur pokok-pokoknya di dalam beberapa ayat al-Qur'an dan banyak hadis. Kedua sumber ini secara eksplisit memaparkan banyak aspek dari hubungan tersebut, salah satunya adalah perlindungan Islam terhadap penduduk yang tidak seagama dengan mayoritas Muslim yang sedang memerintah. Al-Qur'an dan hadis (sunnah) merupakan sumber tertinggi dari pedoman tingkah laku Muslim. Ketentuan dari kedua sumber itu kemudian ditafsirkan ke dalam pemikiran-pemikiran hukum yang pada gilirannya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut *fiqh*.¹ *Fiqh* adalah kodifikasi hukum-hukum *shar'i* mengenai perbuatan manusia, yang menjadi pedoman tingkah laku bagi Muslim dalam seluruh dimensi kehidupannya. Oleh karena itu, sistematika *fiqh* mencakup beberapa bab. Sistematika klasik adalah bahwa *fiqh* terbagi dalam empat bab (*rub'*), yaitu bab *'ibādah*,

¹ 'Aliyy Ḥasb Allāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (T.t.: t.p., 1964), 11-14.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

mu'amalah (hukum kontrak), *munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah* (hukum pidana). Dalam sistematika kontemporer, bab-bab itu dirinci lagi menjadi lebih detail, di mana muncul salah satunya adalah bab tentang politik kenegaraan dan pemerintahan yang disebut *fiqh siyasah*. Dalam sistematika klasik, *fiqh siyasah* termasuk ke dalam bab *jinayah*.

Fiqh siyasah inilah yang membahas seluk beluk urusan kenegaraan baik ke dalam maupun keluar. Salah satu bidang yang dibahas di dalam *fiqh siyasah* adalah hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam hidup keseharian. Di dalam soal hubungan ini terdapat salah satu pembahasan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan non-Muslim ketika mereka sedang menjadi minoritas di dalam sebuah negara yang diperintah oleh masyarakat mayoritas Muslim.²

Sumber dari wahyu mengandung materi-materi tentang pengaturan pergaulan Muslim dan non-Muslim. Ada teks-teks wahyu yang menggariskan sikap keras dan tegas atau yang dapat ditafsirkan sebagai keharusan bersikap seperti itu.³ Ada juga teks-teks tentang bersikap lunak atau yang dapat ditafsirkan keharusan bersikap

² 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indunisi li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1972), 33.

³ Lihat misalnya Surat 3 Al 'Imrān: 118; Surat 5 al-Mā'idah: 51-57; Surat 9 al-Tawbah: 29; dan Surat 48 al-Fath: 29. Sumber-sumber hadis atau sunnah yang senada dengan ayat-ayat ini juga banyak tersedia.

demikian.⁴ Maka tidaklah heran jika di kalangan Muslim muncul beraneka sikap terhadap non-Muslim. Ada sikap antipati yang cenderung menggunakan pendekatan kekerasan terhadap non-Muslim. Ekstremisme seperti ini diposisikan berseberangan dengan sikap ekstrem yang lain, yaitu mengakrabi non-Muslim atas dasar pikiran bahwa agama-agama hanya berbeda-beda namanya, tetapi semuanya adalah agama pemberian Tuhan yang sama, sehingga memiliki kebenaran yang sama pula.

Mengapa ada Muslim yang menjadi berposisi ekstrem seperti itu? Secara umum hal ini akibat tidak komprehensif dalam menyikapi masalah. Mereka yang berkecenderungan keras tampaknya hanya menginginkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggariskan sikap keras. Sebaliknya orang-orang yang berada di seberang mereka, hanya menginginkan ayat-ayat dan hadis yang bisa ditafsirkan sebagai sama sekali mengabaikan perbedaan iman dalam segala persoalan. Buku ini berusaha menampilkan sikap-sikap moderat yang menengahi kedua kecenderungan ini. Akan tetapi apa yang disebut sebagai "di tengah" bukanlah hal demikian kongkretnya seperti melihat sebuah benda yang berada di tengah-tengah dua benda yang lain sehingga dapat diukur secara kuantitatif. Tegasnya, persoalan "di tengah" ini adalah persoalan yang tidak menutup kemungkinan diperdebatkan, apalagi pada

⁴ Lihat misalnya Surat 2 al-Baqarah: 63; Surat 5 al-Ma'idah: 69, 82-85; Surat 60 al-Mumtahanah: 8-9. Dukungan untuk sikap lunak juga banyak didapatkan dari hadis atau sunnah.

umumnya *fiqh* merupakan soal *ijtihadiyah* yang membuka peluang perbedaan pendapat. Artinya, meskipun sumber *fiqh* utama telah disepakati, bukan berarti *fiqh* bermakna keseragaman. Perbedaan, perselisihan bahkan pertentangan pendapat sudah merupakan hal yang lumrah dalam *fiqh*.⁵

Walau demikian, apa yang telah pernah menjadi hasil pemikiran para pendahulu tetaplah merupakan informasi yang berguna bagi generasi sekarang sebagai salah satu hasil peradaban yang dijiwai oleh hasrat menuruti kemauan otoritas tertinggi (wahyu) dan upaya mewujudkannya di tengah masyarakat yang terus berubah. Satu hal lagi, *fiqh siyasah* adalah bidang *fiqh* yang paling terbelenggu dibandingkan dengan bidang-bidang lain, antara lain karena pemikiran-pemikiran tentang negara dan pemerintahan memikul beban berat berhadapan dengan masalah yang sensitif, kekuasaan. Seringkali teoritisasi dalam bidang *siyasah* tidak dapat berbicara terus terang mengenai pendapat mereka berhadapan dengan kekuasaan yang represif yang mewarnai bagian banyak dari sejarah politik umat Islam.

⁵Qatadah misalnya berkata, "Barangsiapa tidak mengetahui *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), maka "hidung"nya belum pernah mencium "bau" *fiqh*. Hisham al-Razi juga mengatakan, "Barangsiapa tidak mengetahui perselisihan *fuqaha*, maka ia bukanlah ahli *fiqh*." Lihat Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1984), 111.

BAB II

MASYARAKAT ATAU NEGARA?

Para ahli sepakat bahwa hasil dakwah dari Nabi Muhammad SAW adalah terbentuknya sebuah masyarakat dengan karakter tertentu yang berbeda dengan karakter masyarakat sekelilingnya maupun masyarakat sebelumnya. Akan tetapi mereka berselisih paham apakah Nabi Muhammad saat itu juga sekaligus membentuk negara. Orang-orang yang menjunjung tinggi cita-cita negara Islam atau kerinduan kepada *khilafah* akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membentuk negara, lebih dari sekedar masyarakat. Sedangkan kaum Muslimin yang tidak memandang pentingnya umat Islam membentuk negara untuk melestarikan agama akan mengatakan bahwa saat itu Nabi hanya membentuk masyarakat. Maka definisi tentang negara adalah salah satu ukuran untuk menimbang dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Dakwah Nabi Muhammad SAW pada mulanya dilakukan secara diam-diam. Sejurus setelah diterimanya wahyu yang pertama, Nabi menyerukan keluarga dan

sahabat-sahabat terdekat beliau untuk mempercayai pokok-pokok agama Islam sebagaimana disebut dalam ayat-ayat 1 sampai dengan 7 surat al-Muddaththir, yaitu percaya akan adanya Allah dan meninggalkan pemujaan kepada berhala. Pada fase ini beberapa orang menerima seruan tersebut, yaitu Khadijah, istri beliau, Aliyy bin Abi Talib, sepupu beliau, dan Zayd, hamba sahaya beliau. Kemudian beriman pula Abū Bakr sahabat kental beliau. Mereka dan orang-orang yang beriman sesudah mereka itulah yang akan menjadi kelompok kader-kader utama dalam mengembangkan agama Islam.⁶ Menyusul kemudian tahap berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Pertama, seruan ini disampaikan kepada Bani 'Abd al-Muṭṭalib, karena ada perintah dalam Surah al-Shu'ara' ayat 214. Kepada mereka Nabi menawarkan jalan keselamatan dunia akhirat.⁷ Sekalipun tantangan keras datang juga dari kerabat beliau ini, tetapi tahap dakwah berikutnya tetap diteruskan untuk memperluas jangkauan dakwah kepada seluruh umat manusia. Orang-orang jauh yang datang untuk menunaikan ibadah haji adalah orang-orang luar Makkah pertama yang menjadi target dakwah beliau.⁸

Pada fase ini tantangan dari masyarakat Quraysh pun semakin menjadi-jadi. Permusuhan yang berbentuk

⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63-64.

⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. I terj. Muchtar Yahya (Jakarta: Jayamurni, t.t.), 60.

⁸ Ibid., 61.

tindak kekerasan terutama ditujukan kepada pengikut-pengikut beliau. Untuk meringankan derita dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas mereka, maka diadakanlah pengungsian ke Ethiopia sebanyak dua kali. Akan tetapi karena rupanya beliaupun akhirnya mendapat perlakuan yang sama dengan mereka, yakni setelah wafatnya paman beliau, Abu Ṭalib, dan tak ada lagi tempat di sekitar Makkah yang dapat dijadikan pusat dakwah, maka Nabi Muhammad mencari jalan lain dengan menyeru Islam terhadap para jama'ah haji yang datang dari penjuru tanah Arab.

A. Perjanjian 'Aqabah

Di antara jama'ah haji yang datang dari penjuru tanah Arab adalah mereka yang datang dari Yathrib (yang kemudian bernama Madinah). Dalam pembahasan ini perlu diterangkan keadaan kota Yathrib sebelum hijrah karena keterangan ini erat hubungannya dengan peristiwa hijrah Nabi sebagai tonggak yang mengawali pembentukan masyarakat (negara) Islam yang pertama yang sangat bersejarah itu.

Di kota Yathrib bertemu dua golongan masyarakat yang sangat berbeda. Golongan pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi. Golongan kedua adalah migran dari Selatan, yaitu suku-suku Arab di antaranya yang terpenting adalah kaum 'Aws dan Khazraj. Suku-suku Arab Yathrib lebih memahami ajaran agama-agama samawi dibandingkan dengan suku-suku Arab di Makkah, karena orang-orang Yathrib kerap kali mendengar ajaran-

ajaran tentang Allah, wahyu, bangkit dari kubur, perhitungan amal, surga, neraka dan lain-lainnya. Hal itu antara lain disebabkan oleh interaksi mereka dengan pengikut Yahudi Yathrib. Permusuhan antara bangsa Arab Yathrib dengan bangsa Yahudi berlangsung berlarut-larut. Suatu saat ketika suku-suku Arab dapat mengalahkan mereka, orang-orang Yahudi selalu berkata, "Tidak lama lagi akan diutus seorang Rasul seperti yang telah tersebut dalam kitab suci kami. Bila dia telah diutus, kami akan mengikutinya. Dengan demikian, kami akan kuat dan dapat mengalahkan kalian." Sementara itu, di antara Aws dan Khazraj sendiri juga telah lama berlangsung permusuhan dan peperangan. Masing-masing berusaha mencari kawan untuk mengalahkan pihak lainnya. Oleh karena itu, maka Aws dan Khazraj masuk agama Islam, bahkan mereka adu cepat memasukinya agar tidak didahului oleh bangsa Yahudi. Sementara itu Aws dan Khazraj juga saling berlomba menganut agama Islam agar tidak didahului pihak lainnya.⁹

Berduyun-duyunlah suku Aws dan Khazraj memeluk agama Islam dan kemudian mereka mengadakan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW di 'Aqabah. Perjanjian 'Aqabah ini terjadi dua kali. Kata 'Ubadah bin al-Ṣamit salah seorang peserta perjanjian 'Aqabah yang pertama, perjanjian itu meliputi kesanggupan untuk tidak lagi mempersekutukan Allah, mencuri, zina, membunuh

⁹ Ibid., 73-74.

anak sendiri, fitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad.¹⁰ Perjanjian 'Aqabah pertama ini diikuti oleh 12 orang laki-laki dan seorang wanita. Pada perjanjian 'Aqabah kedua yang diikuti oleh 73 orang penduduk Yathrib, mereka menerima isi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah setelah mereka meminta agar beliau berkenan berhijrah ke Yathrib dan mereka akan membai'ah Rasul sebagai Nabi dan pemimpin.¹¹ Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut, "Saya (Rasulullah) mengambil perjanjian dari kalian semua, bahwa kalian akan menjaga saya sebagaimana kalian menjaga keluarga dan anak-anak kalian sendiri."

Mereka menerima perjanjian itu dan bahkan sebagai jawabannya mereka berkata mereka akan membela Muhammad SAW, meskipun harus kehilangan harta mereka, atau pemimpin-pemimpin dan orang-orang mulia mereka akan menjadi korban, dan mereka akan sanggup menanggung derita apapun.¹²

Menurut sebagian ahli, Perjanjian 'Aqabah yang terjadi dua kali itu merupakan peristiwa peletakan batu pertama bagi terbentuknya sebuah negara, yakni yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan 112 orang oleh Rasul sebagai pemimpin atau perwira, tiga orang dari suku Khazraj dan sembilan orang dari suku 'Aws. Ini adalah langkah nyata membentuk kekuatan fisik di luar

¹⁰ Ibn Hishām, *al-Sirah al-Nabawīyah* Vol. 2 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, t.t.), 76.

¹¹ Syalabi, *Sejarah*, 75.

¹² Ibn Hisham, *al-Sirah*, 74-77.

Makkah.¹³

B. Hijrah dan Kelahiran Negara Baru

Dengan tampak terbukanya jalan terang bagi dakwah Islam di Yathrib, Nabi berdasarkan perintah Allah menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah ke Yathrib, dengan tujuan menyelamatkan mereka dan agama Islam yang sedang tumbuh. Dengan berkumpulnya Muslimin dari Makkah menggabungkan diri dengan Muslimin di Yathrib (Madinah) serta hadirnya Rasulullah beserta Abu Bakar di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin, berarti herkumpulallah panglima tertinggi dengan para perwira dan pasukannya, maka dapat dikatakan telah berdiri sebuah negara,¹⁴ karena unsur-unsur sebuah negara telah dipenuhi. Adapun unsur-unsur negara adalah, rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, daerah tertentu dan pemerintah yang berdaulat.¹⁵

Unsur pertama adalah rakyat. Di Madinah telah berkumpul kaum Anṣār (Muslimin penduduk asli Madinah), kaum Muhājirin (Muslimin pendatang dari Makkah) yang keduanya telah bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi serta orang-orang musyrik.¹⁶ Kesepakatan mereka untuk membentuk

¹³ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 65.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Soekarno, *Tatanegara Republik Indonesia*, (Bukittinggi-Jakarta: NV. Nusantara, 1962), 12.

¹⁶ Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islāmī*, (T.t: Dār al-Hudā, 1974), 25.

sebuah komunitas dibuktikan oleh tercapainya perjanjian untuk bantu-membantu antara kaum Muslimin (Muhajirin dan Anṣār) di satu pihak dengan non-Muslimin di pihak lain, dengan isi perjanjian sebagai berikut :

- Komunitas yang baru terbentuk tersebut memiliki watak keagamaan dan politik. Masing-masing kelompok di dalamnya memiliki otonomi hukum untuk anggota kelompoknya.
- Kebebasan beragama terjamin untuk semua.
- Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum Muslimin maupun orang Yahudi untuk bantu-membantu moril dan materiil. Mereka harus bersatu dalam menangkis serangan terhadap Madinah.
- Muhammad adalah pimpinan tertinggi bagi penduduk Madinah. Dia juga hakim tertinggi yang menyelesaikan perkara-perkara yang besar.¹⁷

Unsur negara yang kedua adalah daerah tertentu. Sebagaimana telah diketahui, mereka semua telah mengambil Madinah sebagai tanah tumpah darah mereka. Unsur ketiga adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Isi perjanjian tersebut di atas pada nomor empat telah menunjukkan ditaatinya Muhammad SAW sebagai kepala negara dan panglima tertinggi. Di masa itu pula sudah ada hukum yang dipakai sebagai peraturan negara, yakni Hukum Islam. Negara yang berdiri di Madinah itu telah

¹⁷ Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 84.

mengadakan aturan-aturan pertahanan negara, menjaga keamanan, menciptakan dan menjalankan sistem untuk menjamin keadilan, penyebaran ilmu pengetahuan, perolehan kekayaan negara, pembuatan perjanjian-perjanjian, dan pengiriman utusan dan duta. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara sekaligus agamawan, perancang strategi penyebaran Islam, serta sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai Rasul. Pemerintahan Rasul di Madinah berlangsung selama sepuluh tahun. Selama waktu itu Rasul telah meletakkan tonggak-tonggak bagi negara yang besar, menghidupkan semangat bagi perkembangan negara dan memberikan contoh pengendalian pemerintaham negara. Maka dari itu periode kenabian itu menurut kacamata sejarah Islam adalah sebagai periode pembinaan.¹⁸

Pilar-pilar yang telah dipancangkan oleh Rasul di atas secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- *Al-nizām al-siyāsī*, yaitu organisasi politik yang meliputi *kehilafat* (jabatan pengganti Rasul), *wizarat* (kementerian) dan *kitabāt* (kesekretariatan negara).
- *Al-nizām al-idārī*, yaitu organisasi tatausaha negara (administrasi), yang meliputi susunan pemerintahan pusat yang terbagi dalam dewan-dewan, dan pembagian serta kekuasaan wilayah.
- *Al-nizām al-mālī*, yaitu tata ekonomi dan keuangan yang meliputi urusan sumber-sumber dan keluar

¹⁸ Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islamī*, 32.

masuk uang negara dan lain sebagainya.

- *Al-nizām al-ḥarbi*, yaitu organisasi pertahanan negara yang mengurus persenjataan, tentara, pimpinan tentara dan pengadaan pasukan.
- *Al-nizām al-qada'i*, yaitu kekuasaan kehakiman yang meliputi bidang pengadilan, pengadilan banding dan pengadilan ekonomi (*al-ḥisbah*).¹⁹

Periode Rasul digantikan oleh periode *ḡbulafā' rāshidūn*, yakni periode empat orang pengganti Rasul dalam menangani urusan agama dan keduniaan, yang termasuk juga di dalamnya sebagai kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan, *ḡbulafā' rāshidūn* mengikuti petunjuk Rasul dan garis-garis pokok yang telah beliau tetapkan. Periode selanjutnya adalah priode *ḡbilafah* dari Bani Umayyah, dan Bani 'Abbās. Ada beberapa tahapan sejarah yang mereka lalui di mana mereka dengan berangsur-angsur telah berpaling dari prinsip-prinsip petunjuk Rasul itu.²⁰

C. Islam, Teokrasi dan Demokrasi

Bahwa Islam tidak hanya mengurus masalah agama saja, artinya soal-soal yang berkaitan dengan peribadatan, hubungan manusia dengan Tuhan dan akhirat, hal itu telah menjadi keyakinan bagi kaum Muslimin dan ditegaskan oleh para ahli, baik dari kalangan kaum Muslimin sendiri maupun non-Muslim. Kewenangan

¹⁹ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 76.

²⁰ Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islami*, 32.

Islam untuk mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk masalah kenegaraan, telah merupakan hal semestinya, karena Islam memang memiliki ajaran-ajaran yang secara langsung atau tidak langsung mengekspresikan serba-cakup dari ajaran-ajarannya. Tidaklah populer di kalangan kaum Muslimin untuk mempertanyakan campur Islam dalam urusan keduniaan sehari-hari, dan sudah biasa terjadi upaya untuk menimbang berbagai peristiwa sosial maupun hukum sehari-hari dengan kacamata agama, misalnya kalau di Indonesia seperti kegiatan *bahth al-masa'il* atau tanya jawab masalah agama di berbagai media masa. Kaum Muslimin sudah biasa meminta jasa alim ulama untuk memberi fatwa dalam semua masalah kehidupan sehari-hari, dan hal itu berarti fatwa yang berdasar pada agama, yang berarti pula menurut yang dikehendaki Allah.

Beberapa penulis memberikan keterangannya bahwa watak Islam yang seperti ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman pemeluk agama lain terhadap Islam. Seyyed Hossein Nasr, misalnya, menjelaskan bahwa berbeda dengan orang Yahudi yang memiliki kepercayaan terhadap hukum Talmud, orang Kristen dan para orientalis dengan latar belakang agama Kristen lebih sulit memahami karakter hukum Islam yang serba mencakup dan memberikan ketentuan hukum yang demikian kongkret. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa apa yang disebut hukum di dalam agama Kristen, tepatnya kehendak Ilahi mengenai hukum, diekspresikan ke dalam

ajaran-ajaran umum seperti ajaran bermurah hati dan tidak dalam peraturan yang demikian kongkret.²¹

Keyakinan akan perhatian Islam terhadap dunia dan akhirat dalam derajat yang lebih kurang sama, terinternalisasikan di dalam kepribadian Muslim antara lain melalui doa harian yang pasti dilantunkan Muslim ketika mereka berdoa. Biasanya setelah mereka berdoa memohon terkabulnya berbagai macam keperluan dan cita-cita, akhirnya mereka akan menutupnya dengan doa "sapu jagad" yaitu, "wahai Tuhan kami, berikan kami kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirnya serta jauhkan kami dari siksa neraka." Doa ini diambil apa adanya dari salah satu ayat al-Qur'an. Bagi kaum Muslimin, Islam adalah sebuah keharmonisan yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemasyarakatan yang seimbang, hukum perdata, hukum pidana maupun hukum internasional, pandangan filosofis terhadap kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang semuanya terpancar dari dasar yang sama yakni kepercayaan dan watak moral dan spiritual Islam.²² Karena itulah, dengan sendirinya Islam memerlukan diri buat menyajikan aturan-aturan tentang bagaimana menyelenggarakan negara dan pemerintahan untuk melaksanakan hukum-hukum tadi. Secara "kebetulan" pula, keyakinan seperti ini juga ditunjang oleh peristiwa

²¹ Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1975), 94.

²² Muḥammad Quṭb, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait: Dar al-Bayān, t.t.), 9-10.

sejarah yang diperankan oleh Rasulullah sendiri di awal kelahiran Islam, yaitu peristiwa hijrah, sebuah peristiwa yang – dipandang dengan kacamata strategi perjuangan - merupakan usaha untuk membentuk kekuatan di luar Makkah (Madinah) dalam menghadapi penguasa Makkah. Dari kacamata politik, apa yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah tersebut dapat dibaca sebagai sebuah usaha mendirikan negara. Memang benar bahwa ketika di Makkah beliau memulai segalanya hanya sebagai Rasul semata, akan tetapi setelah berhijrah ke Madinah, beliau dengan serta merta memegang berbagai kewenangan yang disandang oleh seorang kepala negara.²³

Konsep kekuasaan di dalam Islam dimulai dari penguasa tertinggi, yaitu Allah. Islam mengajarkan bahwa penguasa yang sebenarnya dari jagad raya ini adalah Allah sendiri. Ia adalah raja segala raja, tidak ada lagi kekuasaan di atasNya. Dengan kekuasaan itu pula Allah telah menugaskan manusia sebagai *kehalifah*Nya di muka bumi ini. Artinya, Allah menyerahkan kekuasaanNya di muka bumi ini kepada manusia. Akan tetapi penyerahan itu bukanlah penyerahan bulat-bulat, karena dalam pandangan Islam, Allahlah yang menentukan siapa orang yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang diberhentikan. Sebuah ayat di dalam al-Qur'an bermakna, katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang

²³ Mutawalliyy, *al-Shari'ah al-Islamiyah*, 57.

Engkau kehendaki".²⁴ Hal ini bermakna bahwa kekuasaan yang diberikan kepada manusia adalah amanat yang harus ditunaikan berdasarkan kehendak dan pengaturan yang diberikan oleh pemberi kekuasaan, yaitu Allah SWT. Manusia sebagai *kehalifah* Allah diberi kekuasaan untuk mengelola bumi ini. Agama Islam menekankan agar di mana saja dijumpai tugas-tugas kolektif, atau pekerjaan yang memerlukan pengendalian, haruslah dijumpai adanya pimpinan, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.²⁵

Salah satu tugas kolektif manusia adalah berbentuk dibangunnya sistem pemerintahan. Manusia mulai membentuknya sejak zaman pra-sejarah dalam bentuk yang sederhana. Sejalan dengan berjalannya waktu, sistem yang sederhana itu kian disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia sendiri. Dalam rentangan sejarah manusia itu, Islam hadir membentuk sejarahnya sendiri dalam rekaman yang dibuat oleh para tokohnya sejak awal kelahirannya. Pada masanya, sistem pemerintahan Islam itu tampil lebih maju dibanding apa yang dipraktekkan pada masyarakat lain. Selanjutnya, sistem pemerintahan Islam mempunyai sifat yang khas, ada ciri-ciri dan ketentuan-ketentuan yang karena itu dia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari sistem-sistem pemerintahan yang ada.²⁶

²⁴ Q.S. 2, Ālu 'Imrān, 26.

²⁵ A. Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 29.

²⁶ Ibid., 56.

Pada masa *Khulafā' Rashidūn* pengangkatan pemimpin selalu diserahkan kepada kaum Muslimin (rakyat). Memaknai prosedur ini, maka sesungguhnya sumber kekuasaan dan kewenangan *khaliḥ* (kepala negara) adalah rakyat. Mereka harus diajak bicara dalam hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan negara, baik secara langsung maupun tidak. Prinsip permusyawaratan ini harus ditegakkan. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan, agar ditegakkan prosedur musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

وشاورهم في الأمر

Artinya:

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".²⁷

وأمرهم شورى بينهم

Artinya:

"Sedang, urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka".²⁸

Dengan melihat ketentuan ini maka di antara bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan yang paling dekat dengan ketentuan Islam adalah republik dan demokrasi, dan yang paling jauh adalah sistem pemerintahan diktator. Kesimpulan demikian didasarkan pada penghargaan Islam atas cara-cara musyawarah yang berarti dukungannya pada hak rakyat memilih pemerintah, hak rakyat memberhentikan pemerintah, dan

²⁷ Q.S. 3: *Ālu 'Imrān*, 159.

²⁸ Q.S. 42: *al-Shura*, 38.

keharusan bermusyawarah. Hak-hak ini tidak ditemukan pada sistem yang diktator dan lebih mungkin didapatkan pada negara republik dengan pemerintahan yang demokratis.

Jadi sistem pemerintahan demokrasilah yang dekat dengan sistem pemerintahan Islam. Dikatakan dekat, bukan persis, karena di samping ada kemiripannya dengan Islam, tetapi juga ada perbedaannya. Perbedaannya yang penting adalah Islam telah menentukan norma-norma tentang kebajikan dan kejahatan. Sebab itu kaum Muslimim hanya boleh ber*ijtihad* dalam batas-batas norma-norma itu. Akan tetapi demokrasi memberi kebebasan kepada manusia membuat dan menentukan norma-norma itu.²⁹ Dalam demokrasi Barat, menurut konsepsi yang umum, sumber hukum adalah kemauan rakyat yang berdaulat. Tujuannya adalah stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum didekritkan oleh Tuhan. Orang-orang yang beriman menaatinya dengan tujuan semata-mata untuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Tuhan.³⁰

Demikian juga sistem pemerintahan Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi. Memang ada orang yang mengira bahwa pemerintahan Islam itu adalah pemerintahan teokrasi. Selintas tampak persamaan antara kedua pemerintahan itu pada pertaliannya dengan

²⁹ Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 61.

³⁰ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H. M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 170.

agama.³¹ Akan tetapi ada dua hal yang menyebabkan sistem pemerintah yang dipilih Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi. *Pertama*, kehendak Tuhan mengikat semua orang di dalam negara, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada jelata, sehingga hukum akan ditegakkan untuk mereka semua, bukan hanya mengikat negara dengan menjadikan Islam sebagai dasar perundang-undangan nasional. *Kedua*, kepala negara tidak membentuk hukum, akan tetapi lebih banyak hanya mengawasi jalannya hukum Tuhan.³² Tugas *khalifah* (kepala negara Islam) tak lain hanyalah memegang kendali atau mengatur urusan dalam usaha untuk menjalankan Islam dan agar segenap usaha ke arah itu berjalan tertib dan lancar. Tugas-tugas itu bukanlah sesuatu yang demikian istimewa sehingga menunjukkan adanya hubungan istimewa antara *khalifah* dengan Allah. Tugas *khalifah* tidak sama dengan tugas pendeta atau paus. *Khalifah* tidak bisa mengampuni dosa ataupun membuat hukum. Dari segi agama, tak ada keistimewaan baginya. Menjadi imam dalam salat hanyalah tugas biasa saja, tugas yang boleh dikerjakan oleh Muslim lain, walaupun ia seorang budak sekalipun.³³ Seorang *khalifah* bukan seorang kepala agama. Tak pernah pula ada suatu kasta keagamaan yang secara istimewa dibenarkan memonopoli hak memerintah masyarakat Islam, karena dalam Islam ti-

³¹ Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 61.

³² Boisard, *Humanisme dalam Islam*, 168.

³³ Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 57.

dak ada gereja.³⁴ Keterangan-keterangan di atas sekedar menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dikehendaki Islam adalah khas, yang tidak bisa disamakan dengan sistem lain yang manapun, bukan demokrasi dan bukan pula teokrasi, tetapi "Islam".

D. Sumber-sumber Perundang-Undangan Negara Islam

Bagi orang yang belum pernah mendapat keterangan yang benar tentang syari'at Islam, maka begitu dia mendengar kata "syari'at Islam", mungkin akan tergambar di benaknya peraturan-peraturan yang melulu mengatur soal salat, puasa dan ibadah-ibadah lain yang khusus dipakai sebagai jalur hubungan antara manusia dengan Allah. Akan tetapi sesungguhnya Islam mengatur segala seluk beluk hubungan antara sesama manusia, bahkan antara manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan hidup maupun lingkungan tak-hidupnya. Islam bagaikan bangunan yang kokoh dan padu tentang tata aturan yang dibutuhkan oleh manusia. Aturan-aturan dalam Islam memiliki kekuatan dinamika dan elastisitas sedemikian rupa untuk melayani segenap perkembangan dari seluruh persoalan kehidupan manusia yang seakan tanpa batas dan selalu bertambah itu. Secara garis besar, hukum Islam dibagi menjadi dua bagian pokok, yakni bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Bidang ibadah berisi hukum atau aturan yang dimaksudkan untuk

³⁴ Boisard, *Humanisme dalam Islam*, 169.

mengatur tatacara manusia mendekatkan diri kepada Allah, atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti ketentuan tentang salat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Bidang muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia dalam selain soal ibadah murni di atas. Kedua bidang ini diturunkan dari sumber utama yang sama, al-Qur'an dan Sunnah, yang juga merupakan sumber hukum utama bagi hukum Islam secara umum, bahkan sumber seluruh ajaran Islam. Oleh karena soal perundang-undangan adalah salah satu cabang dari muamalah, maka sumber-sumber perundang-undangan menurut Islam adalah sama saja dengan bidang muamalah lainnya, yang berarti memiliki sumber yang sama dengan hukum Islam umumnya, juga ajaran Islam umumnya pula.

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi dasar negara di dalam Islam dalam arti yang khas. Di sini al-Qur'an hanya meletakkan prinsip-prinsip umum dari tata hukum ini dan menyerahkan tugas untuk merincinya kepada Rasulullah SAW. Beliau memberikan perinciannya dengan apa yang dikenal dengan Sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, Rasul menyerahkan penerapan aturan-aturan tadi kepada para pemikir maupun praktisi agar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Kehidupan Rasul sebagai kepala negara Islam hanyalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak mungkin bahkan tidak selayaknya apabila beliau membuat perincian peraturan negara. Oleh karena

itu Rasul hanya menetapkan sebagian saja dari prinsip-prinsip atau pokok-pokok aturan ketatanegaraan saja, sedang pelaksanaannya diserahkan kepada seluruh umat agar disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi dengan tetap berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, proses perumusan undang-undang juga akan melibatkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah* dan juga *'urf*. *'Urf* adalah adat istiadat, tradisi atau kebiasaan yang disahkan juga sebagai sumber perundang-undangan, sebagaimana disahkan pula sebagai sumber hukum Islam umumnya.

1. Al-Qur'an

Survey sederhana terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam perspektif pembidangan hukum telah menghasilkan klasifikasi tentang bidang-bidang hukum yang diatur oleh al-Qur'an, yakni:

Pertama, hukum-hukum tentang keimanan (*al-ahkām al-i'tiqadiyah*), yang mencakup keimanan yang harus dimiliki oleh semua *mukallaf* (orang yang terkena beban hukum), yaitu iman kepada Allah, MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-rasulNya, serta percaya kepada hari Kiyamat.

Kedua, hukum-hukum tentang akhlak (*al-ahkām al-khuluqiyah*), menjelaskan sifat-sifat terpuji yang harus dipunyai dan sifat-sifat tercela yang harus dijaui.

Ketiga, hukum-hukum 'amaliyah (*al-ahkām al-'amaliyah*), mengatur tindakan manusia yang meliputi

meliputi dua macam. *Pertama*, hukum-hukum ibadah (*ahkam al-'ibadat*), yaitu peraturan tentang puasa, zakat, haji, *nadhr*, sumpah, dan sebagainya, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hukum-hukum muamalah (*ahkam al-mu'amalat*), yaitu ketentuan tentang berbagai akad kebendaan dan perbuatan hukum lainnya yang mengatur hubungan antar para antara sesama manusia baik sebagai perorangan maupun kelompok.³⁵ Hukum muamalah ini masih dibagi-bagi ke dalam bidang-bidang hukum yang lebih terinci, antara lain bidang yang mengatur soal-soal kenegaraan, yakni:

- *Al-ahkam al-dusturiyah*, yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menetapkan hak-hak individu dan masyarakat. Ayat-ayatnya berjumlah sekitar 10 buah.
- *Al-ahkam al-dawliyah*, yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya, hubungan antara kaum Muslimin dengan non-Muslimin di dalam negara Islam. Bidang ini dimaksudkan untuk menetapkan hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya pada masa perang maupun damai serta menetapkan hubungan kaum Muslimin dengan non-Muslimin di dalam negara Islam. Ayat-ayat yang mengaturnya di

³⁵ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis Tinggi Dakwah Islam Indonesia, 1972), 32.

dalam al-Qur'an berjumlah sekitar 25 buah.³⁶

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan restu Rasulullah SAW.³⁷ Sunnah adalah sumber kedua sesudah al-Qur'an. Artinya bila suatu ketentuan tidak didapati aturannya di dalam al-Qur'an, maka pencarian berikutnya lakukan di dalam Sunnah. Salah satu fungsi dari Sunnah adalah sebagai penjelas ayat al-Qur'an yang masih memerlukan penjelasan.³⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa al-Qur'an dan Sunnah dalam mengatur soal-soal kenegaraan hanyalah menetapkan pokok-pokoknya saja mengingat bahwa kebutuhan di dalam soal tersebut selalu mengalami perkembangan dengan berkembangnya zaman. Cara penetapan seperti ini dimaksudkan untuk menciptakan keluwesan dan kesiapan sebuah sistem tatahukum dalam menghadapi perkembangan. Lebih dari pada itu, teks-teks al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya bisa dipahami secara lahiriyah atau apa yang tersurat saja, akan tetapi dapat dipahami dan diambil hukumnya dari apa yang tersirat. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum Islam dibenarkan pula pemakaian beraneka metode penggalan hukum Islam. Metode-metode tersebut dapat didalami pada literatur tentang *uṣūl fiqh*, yakni pada pembahasan tentang dalil-dalil hukum atau

³⁶ Ibid., 33.

³⁷ Ibid., 36.

³⁸ Ibid., 39.

adillat al-ahkām (sumber hukum). Orang menggunakan metode-metode tersebut ketika melakukan *ijtihad*, yaitu riset menemukan hukum. *Ijtihad* itu, selain disebut sebagai metodologi, sekaligus sering juga diartikan sebagai *adillah* atau sumber hukum itu sendiri.

3. *Ijtihad*

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan intelektual dan segala kemampuan ilmiah untuk menemukan sesuatu hukum agama.³⁹ Artinya, *ijtihad* adalah kegiatan untuk menggali hukum fiqh Islam dari sumber-sumbernya. Bidang *ijtihad* adalah segala kasus hukum yang tidak memiliki landasan penyelesaian dari dalil-dalil *qaṭ'i*.⁴⁰ Artinya yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah peristiwa-peristiwa yang belum ditentukan secara tegas mengenai hukumnya. Tidak adanya ketegasan itu bisa mengenai validitas dan otoritas dalil, dapat juga mengenai persoalan pemahaman terhadap ayat-ayat dari al-Qur'an dan teks hadis atau Sunnah yang menerima multi tafsir. Lapangan *ijtihad* juga tentu saja adalah kasus hukum yang memang sama sekali tidak ada ayat dari al-Qur'an maupun Sunnah yang memberikan penyelesaian. Ini adalah lapangan *ijtihad* yang paling luas.⁴¹

Dalam kaitan ini, dalil-dalil tentang masalah-masalah kenegaraan dan hukum antargolongan adalah sangat

³⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 40.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Khallāf, *ʿIlm Uṣul al-Fiqh*, 216-217.

sedikit jumlahnya di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yaitu hanya dalam bentuk garis besarnya saja. Dengan demikian, bidang kenegaraan dan hukum antargolongan ini mengundang seluasnya kemampuan pemikiran manusia dalam kegiatan *ijtihad*. Tentang hal ini, Muhammad Asad menjelaskan bahwa syari'at Islam telah mengantisipasi segala kemungkinan kebutuhan manusia tentang undang-undang yang berketuhanan dan sekaligus tanggap terhadap perkembangan.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral dari rakyat negara Islam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yang tidak berubah dengan berubahnya kondisi dan situasi. Dengan demikian al-Qur'an dan Sunnah bukan merupakan konstitusi untuk negara Islam dalam arti teknis, karena konstitusi itu memuat hubungan antar kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam negara, syarat-syarat menjadi kepala negara, menteri-menteri, kewajiban dan tanggung jawab mereka serta wewenang mereka. Sedang di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat perincian tentang soal-soal ini, melainkan hanya tersedia garis-garis besar yang perinciannya diserahkan kepada manusia agar disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi.⁴³ Jadi, kedudukan al-Qur'an dan Sunnah berada

⁴² Muhammad Asad, *Masalah Kenegaraan dalam Islam*, terj. Oemar Amin Hoesin, (T.t.: Yayasan Kescjahteraan Bersama, t.t.), 15.

⁴³ Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami*, 122.

di atas konstitusi yang harus dihormati oleh semua pihak dalam pembuatan konstitusi. Semua peraturan, baik konstitusi maupun peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya harus bisa dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung atau setidaknya harus selaras dengan jiwa syari'at Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan Sunnah tadi.

Akan tetapi tidak selamanya undang-undang dasar negara berupa dokumen tertulis. Beberapa negara justru memiliki undang-undang dasar yang tidak tertulis. Sebagai contoh yang terkenal dari undang-undang dasar tak tertulis ialah Undang-undang Dasar negara Inggris.⁴⁴ Islam tidak menunjuk mana di antara kedua macam undang-undang dasar itu yang lebih baik. Ini adalah suatu contoh di mana Islam hanya menuruti saja apa yang dipandang lebih baik oleh manusia. Ini adalah kata lain bahwa Islam menghormati tradisi, kebiasaan atau adat. Hukum Islam memang menerima sumbangan dari adat kebiasaan sebagai salah satu sumbernya. Adat kebiasaan ini di dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan nama '*urf*'. Jadi '*urf*' adalah salah satu bahan untuk memperkaya ketentuan di dalam hukum Islam, termasuk di dalam soal kenegaraan. Secara teknis, '*urf*' diberi pengertian sebagai "perkataan, perbuatan (berbuat atau tidak berbuat sesuatu) yang telah terkenal di masyarakat dan telah mereka biasakan".⁴⁵

⁴⁴ Soekarno, *Tatanegara Republik Indonesia*, 72.

⁴⁵ Khallaf, *Ilm Uṣul al-Fiqh*, 89.

'Urf tidak terlalu pelik konsepnya di dalam *uṣul al-fiqh*. Yang paling penting dari semua keterangan mengenai 'urf adalah bahwa 'urf dibedakan menjadi dua macam, 'urf *ṣaḥīḥ* (legal) dan 'urf *fāsid* (illegal). 'Urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.⁴⁶ Kebiasaan inilah yang diterima sebagai bahan atau sumber pembinaan hukum di dalam Islam. 'Urf *fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama, menghalalkan yang haram, atau menggugurkan kewajiban.⁴⁷

'Urf *ṣaḥīḥ* harus diperhatikan di dalam pembuatan peraturan, atau keputusan hukum yang oleh *mujtahid* maupun hakim, karena pada dasarnya tradisi menunjukkan kesadaran hukum yang paling mendalam dari masyarakat, yang tentu mengandung *maṣlaḥah* yang perlu diindahkan oleh Islam. Aturan yang bertentangan dengan tradisi, pada umumnya mendapat resistensi sehingga sulit berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Dengan kata lain, jika Islam memberlakukan aturan yang diselaraskan dengan tradisi yang hidup di masyarakat, maka aturan itu mempunyai kesempatan yang baik untuk ditaati oleh masyarakat. Hanya saja, kebiasaan itu sendiri haruslah selaras dengan Islam. Oleh karena itu, 'urf *fāsid* bagaimanapun juga akan ditolak Islam.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kebiasaan yang

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

hidup di lembaga-lembaga pemerintahan yang dianggap sebagai peraturan atau bahkan undang-undang maupun undang-undang dasar tak tertulis, hal ini bisa dibenarkan dan mengikat oleh syari'at Islam selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan jiwa syari'at Islam.

E. Prinsip-prinsip Perundang-undangan Negara di dalam Islam

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa ayat al-Qur'an dan Sunnah mengenai soal-soal kenegaraan hanya sedikit saja jumlahnya. Namun kedua sumber itu telah menetapkan beberapa prinsip yang tidak boleh diganti dengan prinsip lain untuk selama-lamanya, karena hanya dengan prinsip-prinsip tersebut ketertiban seluruh urusan kenegaraan akan terjamin.

Di kalangan para ahli fikir Islam belum ada kesepakatan mengenai jumlah dan macam prinsip-prinsip tadi. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak hakiki, yakni menurut pendapat penulis bahwa bukan berarti mereka saling menolak pendapat yang lain, akan tetapi mereka membenarkan juga, hanya saja mereka berlainan dalam cara membaginya. Jadi mereka tidak berselisih tentang apakah Islam mempunyai prinsip-prinsip tersebut atau tidak, apakah al-Qur'an dan Sunnah datang dengan membawa prinsip-prinsip tersebut atau tidak, jadi tidak prinsipil.

Muhammad Yūsuf Musā berpendapat bahwa hukum

perundang-undangan Islam berdasar atas tiga prinsip. *Pertama*, musyawarah, yakni musyawarah atas soal-soal yang memang harus dimusyawarahkan, yaitu tentang persoalan umat; *kedua*, keadilan hukum, penguasa dan para pegawai yang ada di bawahnya; dan *ketiga*, menugaskan orang-orang yang sanggup (cakap) dan jujur dalam bidang-bidang pemerintahan.⁴⁸

Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, sebagaimana dikutip oleh Mutawallī, prinsip-prinsip hukum perundang-undangan Islam ada tiga yakni musyawarah, keadilan dan persamaan.⁴⁹ Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip tersebut ada tiga, yakni *pertama*, musyawarah. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat 38 surat 42 al-Shūrā. *Kedua*, keadilan. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat ke 58 surat 4 al-Nisā'. *Ketiga*, persamaan. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat 10 surat 49 al-Hujurat.⁵⁰ Pendapat Mutawallī adalah bahwa prinsip-prinsip perundang-undangan di dalam Islam meliputi permusyawaratan, keadilan, persamaan, kebebasan dan pertanggung jawaban penguasa.⁵¹

Dengan demikian, seperti yang telah disinggung di depan, bahwa masing-masing para ahli yang mengajukam

⁴⁸ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.), 117.

⁴⁹ 'Abd al-Ḥamid Mutawallī, *Mabadi' Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Iskandariyah: al-Ma'arif, 1978), 240.

⁵⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 28-29.

⁵¹ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, 34.

pendapat tidak mempunyai keberatan prinsipil terhadap pendapat orang lain. Tampaknya hal itu hanya soal penekanan yang berbeda saja. Akan tetapi sesungguhnya semua pendapat yang telah diajukan itu memang merupakan lukisan yang benar mengenai apa hal-hal pokok yang telah dibawa oleh Islam. Hanya saja mereka berbeda dalam menyebut secara ringkas tentang gagasan gagasan pokok tersebut.

Berbeda dengan hal-hal yang telah ditetapkan dengan terinci dan pasti seperti masalah-masalah ibadah murni, yang tujuannya tidak mesti dapat dipahami dengan baik oleh nalar manusia, prinsip-prinsip perundangan di atas kesemuanya sepenuhnya dapat dipahami tujuannya oleh nalar manusia. Apa yang telah dibawa oleh Islam itu demikian gamblangnya sehingga dapat difahami sebagai bertujuan demi ketertiban dan kelancaran urusan mereka. Apa yang telah ditetapkan di atas adalah sesuai dengan tuntutan naluri (fitrah) manusia dan akal sehat. Dengan asumsi seperti itu, maka kemudian Islam menyerahkan kepada manusia agar mereka membuat perincian dari prinsip-prinsip tadi menjadi peraturan-peraturan imperatif. Oleh karena itu semua peraturan yang ada di dalam negara Islam haruslah dapat dikembalikan kepadanya. Semua peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka penerapan dari prinsip-prinsip tersebut, yakni permusyawaratan, persamaan, kebebasan, keadilan dan pertanggung jawaban penguasa. Jadi tidak dibenarkan adanya peraturan yang justru mengurangi arti atau

bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang sudah ditetapkan.

F. Tujuan Negara dalam Islam

Berhubung dengan watak Islam yang menolak pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, maka sudah semestinya pula Islam datang dengan membawa aturan aturan untuk mewujudkan kebahagiaan di kedua alam itu. Islam mempunyai peraturan tentang kenegaraan, waris-mewaris, ekonomi, politik, hukum pidana, hukum perdata berikut acaranya dan lain-lain, di samping ibadah-ibadah murni seperti salat, puasa dan haji. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan adanya kewajiban untuk menjalankan aturan-aturan itu. Untuk melaksanakannya tidak bisa tidak mestilah ada kekuasaan yang menjaminnya, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kepada hukum-hukum Islam yang dalam hal ini adalah negara Islam.

Di dalam kitab suci al-Qur'an, perkataan *balad* (negeri/negara) disebutkan sampai 19 kali dalam bentuk kata *balad*, *balad* dan *bilad*. Di antaranya ada ayat yang berisikan cita-cita sosial Islam dalam surat Saba' ayat 15 sebagaimana akan diterangkan nanti. Lebih menarik lagi, di dalam al-Qur'an terdapat sebuah surat yang bernama "al-Balad" yang beberapa ayatnya memuat gagasan tentang "negara" yang dicita-citakan oleh Islam yang oleh Ibn Sina dinamakan "negara adil makmur".⁵² Di dalam

⁵² Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 34.

surat al-Tīn Allah bersumpah dengan empat macam benda yang kesemuanya mempunyai arti penting bagi manusia terutama dari segi sejarah.⁵³ Dengan mempelajari sumpah-sumpah Allah di dalam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dipakai sebagai sumpah oleh Allah pastilah merupakan sesuatu yang bernilai penting,⁵⁴ atau benda-benda yang oleh Allah dihargai.⁵⁵ Dalam surat al-Tīn tadi Allah bersumpah dengan kata "al-Balad" (negeri ini), yakni negeri Makkah,⁵⁶ yang dikuatkan dengan kata yang datang sesudahnya yakni "al-amīn" (yang aman dan tenteram). Hal ini berarti Allah memberi penghargaan yang tinggi kepada negeri Makkah yang mempunyai sifat aman itu. Berikut ini sebuah ayat al-Qur'an di dalam surat al-'Ankabūt ayat 67 memberikan gambaran sekelumit gambaran tentang bagaimana keamanan dari kota Makkah tersebut:

أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

Artinya:

"Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedangkan manusia di sekitarnya

⁵³ Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. X (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), 194.

⁵⁴ Ibid., 23.

⁵⁵ Ibid., 95.

⁵⁶ Ibid., 193.

rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?"⁵⁷

Keadaan aman yang disebut di dalam ayat tersebut berarti adalah lawan dari keadaan rampok-merampok atau "kekacau-balauan". "Aman" inilah yang dicitakan oleh Islam.

Ada sebuah ayat lagi di dalam al-Qur'an yang menggambarkan cita-cita pembentukan negara seperti yang disebutkan di atas, yakni surat Saba' ayat 15:

بلدة طيبة ورب غفور

Artinya:

"Negerimu adalah negeri yang baik dan (Tuhan mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".⁵⁸

Secara tersirat, pujian Allah kepada negeri Saba' yang sebagai negeri yang sejahtera dan diliputi oleh ampunan Tuhan, juga merupakan cita-cita sosial dan politik dari pembentukan negara di dalam Islam. Cita-cita ini meliputi sektor kehidupan masyarakat yang demikian luas yang merupakan kondisi yang harus tercapai untuk kebahagiaan seluruh warganegara. Di sini harus dijamin perkembangan dari masyarakat menuju kesejahteraan bersama di masa depan dengan menegakkan persamaan hak dan keadilan. Lebih dari itu, Islam juga mencitakan karakter masyarakat yang menjamin "ampunan Tuhan",

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 638.

⁵⁸ Ibid., 685.

yang tentu saja hal ini berarti perilaku kolektif yang "direstui Tuhan", yang sekaligus menunjukkan bahwa negara hanyalah merupakan kendaraan untuk merealisasikan cita-cita kebahagiaan dunia dan, tidak boleh tidak, kebahagiaan akhirat.

Ringkasan

Sebuah masyarakat Islam nyata-nyata telah lahir segera setelah Rasulullah dan para shahabat beliau berhijrah ke Madinah. Beberapa pemikir telah memastikan bahwa pada saat bersamaan, sebuah negara baru dengan karakter khas juga telah lahir. Dikatakan sebuah negara karena syarat-syarat sebuah negara telah terpenuhi. Kekhasan yang dimiliki oleh komunitas baru ini meliputi sistem dan bentuk pemerintahan, yang diteruskan oleh negara-negara yang lahir sesudahnya yang kemudian direkonstruksi oleh beberapa pemikir Muslim menjadi teori tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh peraturan yang berlaku di kawasan yang diperintah oleh kaum Muslimin dibuat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta prinsip-prinsipnya, yang kemudian diperinci menjadi peraturan praktis dengan jalan bermacam-macam metode *ijtihad*. Semua peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk mencapai cita-cita sosial politik yang ditetapkan oleh Islam, yakni kesejahteraan kolektif dalam dimensi material dan spiritual, atau dalam bahasa agama disebut sebagai kebahagiaan dunia akhirat.

BAB III

PENGGOLONGAN PENDUDUK NEGARA DI DALAM ISLAM

Untuk memahami secara utuh konsep tentang penggolongan penduduk menurut Islam (*fiqh siyāsah*), perlu terlebih dahulu diberikan pembahasan tentang pembagian kawasan dunia menurut para ahli *fiqh* Islam.

A. Pembagian kawasan dunia

Para ahli *fiqh* Islam membagi kawasan dunia ini menjadi dua bagian ya'ni *dar al-Islām* dan *dar al-ḥarb*.⁵⁹

- *Dar al-Islām*, secara harfiah berarti "kawasan Islam", meliputi semua negara yang ditegakkan di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Jadi termasuk ke dalam *dar al-Islām* negara yang semua atau sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum Muslimin, juga semua wilayah yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslimin walaupun sebagian besar

⁵⁹ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasbīr al-Jinā'i al-Islāmī*, vol. I (Beirut: Dār al-Katīb al-'Arabī, t.t.), 275.

penduduknya tidak terdiri dari kaum Muslimin. Demikian juga termasuk kalangan *dar al-Islam*, negeri yang diperintah dan dikuasai oleh non-Muslim selama kaum Muslimin yang berada di dalamnya bisa melaksanakan hukum-hukum Islam dengan bebas.⁶⁰

- *Dar al-harb*, yang secara harfiah berarti "kawasan perang", mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam, yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam, baik di antara penduduknya terdapat orang Islam ataupun tidak, selama penduduknya yang beragama Islam tidak bisa melaksanakan hukum Islam.⁶¹

Makna harfiah dari *dar al-Islam* dan *dar al-harb* dalam bahasa Indonesia adalah "negeri damai" dan "negeri perang",⁶² atau "kawasan Islam" dan "kawasan perang".⁶³ Mungkin pembagian dunia secara binair ("serba bagi dua") yang dibuat oleh para *fuqaha'* seperti itu menimbulkan kesan negatif bagi sementara pihak, terutama jika diperhatikan istilah "negeri perang". Mungkin akan terbayang gambaran yang menyeramkan tentang sikap negeri Islam (kaum Muslimin) terhadap

⁶⁰ Ibid., 275-276.

⁶¹ Ibid., 277.

⁶² Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 17-18.

⁶³ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 232.

negara non-Islam tatkala diketahui bahwa istilah itu diperuntukkan bagi negara-negara non-Islam. Jadi seakan-akan dunia hanya dan selalu dibelah menjadi dua kekuatan yang saling bermusuhan.

Untuk itu akan dipaparkan di sini beberapa kenyataan:

Pertama, pengaruh suasana politik pada waktu munculnya konsep para *fugaha'* yang membagi kawasan dunia menjadi dua bagian tersebut. Seperti diketahui bahwa pada waktu itu mulai dari kaum musyrikin Makkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi telah serentak memaklumkan perang terhadap Islam sedangkan orang Islam selalu dalam keadaan membela diri, sehingga dengan demikian ada dua kekuatan yang saling bermusuhan yakni kekuatan Islam dan kekuatan musuh-musuhnya. Hal itu membawa pengaruh terhadap penyusunan konsep para ahli hukum Islam yang hidup pada waktu itu dalam membagi dunia. Sedangkan pembagian tersebut hanyalah semata-mata pendapat saja (*ijtihadi*) yang tidak berdasar pada arahan eksplisit al-Qur'an maupun Sunnah.⁶⁴

⁶⁴ 'Aliyy 'Aliyy Manṣūr, *al-Sharī'ah al-Islamiyah wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm* (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyah, 1971), 192.

Kedua, pada masa sekarang pemerintah Muslim tidak dalam keadaan yang membolehkan mengadakan peperangan terus menerus terhadap negeri lain.⁶⁵

Ketiga, sikap negara Islam terhadap negara-negara non-Islam telah ditegaskan di dalam al-Qur'an. Tidak ada di dalamnya pernyataan yang memaksudkan baik secara langsung maupun tidak adanya peperangan yang berlangsung terus menerus. Al-Qur'an telah jelas menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal tak terelakkan sebagai sebuah cara membela diri, dan bukan sebuah pola umum hubungan antara Muslim dan non-Muslim.

وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَاقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(البقرة: ١٩)

Artinya :

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁶⁶

Jadi, pembagian kawasan dunia secara binair tersebut bukanlah merupakan teori yang mati, karena seperti telah

⁶⁵ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1961), 69.

⁶⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yamunu, 1970), 46.

disebutkan di atas, hal itu adalah masalah *ijtihadīyah* yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu itu. Ada baiknya penyusun paparkan pendapat lain, yakni yang membagi kawasan dunia tidak terbatas kepada *dar al-Islam* dan *dar al-ḥarb* saja, akan tetapi menambahkan lagi dengan apa yang dinamakan *dar al-'ahd*. Di antara *fugaha'* ada yang menetapkan bahwa di antara *dar al-Islam* dan *dar al-ḥarb* terdapat kawasan yang dinamakan *dar al-'ahd*.⁶⁷ Sebagian yang lain menambahkan lagi *dar al-silm*.⁶⁸ *Dar al-'ahd* adalah daerah atau negara yang tidak tunduk kepada kekuatan Islam, tetapi mempunyai perjanjian damai yang harus dihormati oleh mereka dan *dar al-Islam*, dan mereka mempunyai kekuasaan penuh atas daerahnya.⁶⁹ *Dar al-silm* adalah daerah yang bertetangga dengan wilayah Islam dan tidak dikhawatirkan adanya penyerangan dari mereka.⁷⁰

Dalam hubungan dengan *dar al-'ahd*, penulis berpendapat bahwa *dar al-'ahd* ada dua macam:

Pertama, negara yang memaklumkan perang kepada Islam atau memusuhi umat Islam yang kemudian negara Islam menawarkan tiga pilihan yakni menjadi *ahl al-dhimmah*, memeluk Islam atau berperang dan ternyata mereka memilih untuk menjadi *ahl al-dhimmah* dengan membayar *jizyah* (pajak kepala) sebagai imbalan dari jaminan keamanan bagi mereka. Adapun *dar al-'ahd*

⁶⁷ Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, 121.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

macam yang pertama telah diberikan definisi oleh para ahli sebagai negeri atau negara yang tidak berada di bawah pemerintahan kaum Muslimin yang mempunyai hubungan dengan negara Islam dengan membayar upeti.⁷¹ Pembahasan tentang *abl al-dhimmah* akan dijumpai pada sub-bab berikutnya. *Kedua*, negara yang bukan negara Islam yang tidak memusuhi Islam dan telah mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Dalam hal ini negara tersebut bisa disamakan dengan negara sahabat. Macam *dar al-'ahd* yang terakhir inilah justru yang dijumpai pada saat ini, karena negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam telah banyak membuat persetujuan-persetujuan persahabatan dengan negara-negara non-Islam. Akan tetapi walaupun perjanjian tadi telah dibuat, negara tersebut tetap juga dinamakan *dar al-harb* jika kaum Muslimin dan *dhimmiyin* tidak mendapatkan jaminan keamanan.⁷²

Sebenarnya *dar al-'ahd* dan *dar al-silm* sudah bisa dicakup di dalam definisi *dar al-Islam* yang diberikan oleh 'Abd al-Qādir 'Awdah di atas, karena di sana disebutkan termasuk *dar al-Islam* negara yang dikuasai non-Muslim selama kaum Muslimin yang berada di dalamnya bisa melaksanakan hukum-hukum Islam. Sedangkan *dar al-'ahd* dan *dar al-silm* pasti dinamakan *dar al-harb* bila kebebasan menjalankan hukum-hukum tersebut tidak ada. Dus, di dalam *dar al-'ahd* dan *dar al-silm* pun disyaratkan adanya

⁷¹ Ibid.

⁷² H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, 69.

kebebasan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan syari'at Islam, yang dengan demikian sudah mencukupi syarat untuk dinamakan *dar al-Islam* menurut yang didefinisikan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah.

Akan tetapi di dalam buku ini, penulis cenderung untuk memisahkan *dar al-'ahd* dan *dar al-silm* dari *dar al-Islam* karena pada pembahasan berikutnya akan dijumpai bahwa menurut hukum asalnya, Muslimin dan *dhimmiyin* bebas (tidak boleh dicegah) keluar/masuk dari/ke kawasan Islam yang lain walaupun masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri pada wilayah yang mereka tempati. Selama masih berada di kawasan Islam, mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan penduduk asli.

Kemudian masalahnya mana mungkin kebebasan dan persamaan ini terwujud kalau bukan antara kawasan yang sama-sama diperintah kaum Muslimin, karena kebebasan dan persamaan itu ditetapkan oleh ulama' Islam yang belum tentu ditaati oleh pemerintah non-Muslim walaupun kawasan yang mereka perintah sudah bisa dimasukkan kawasan Islam menurut pendapat 'Abd al-Qadir 'Awdah. Artinya tidak mungkin untuk memaksakan hukum Islam tersebut kepada pemerintah-pemerintah yang memang tidak memakainya sebagai aturan pemerintahan.

Konsekuensi dari pemisahan *dar al-'ahd* dan *dar al-silm* dari *dar al-Islam* adalah pengkhususan *dar al-Islam* hanya untuk wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Islam

yakni pemerintah yang aturan-aturan kenegaraannya didasarkan kepada syari'at Islam. Dan *dar al-Islam* macam inilah yang juga dinamakan negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*).

B. Warga Negara

Di dalam kitab-kitab hukum Islam pembahasan tentang warganegara negara Islam boleh dikatakan tidak ada. Apa yang dibahas di sana adalah penduduk *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa adanya pembagian dunia menjadi dua kawasan tampaknya karena pada waktu itu dunia memang terbagi menjadi dua kekuatan besar yang saling bermusuhan dan negara-negara yang berada di dalam kawasan Islam tidaklah banyak. Akan tetapi pada saat ini kawasan Islam mencakup banyak negara dan masing-masing mempunyai pemerintahan berdaulat dan berdiri sendiri. Ditambah lagi bahwa negara-negara tersebut terpisah-pisah letaknya, jadi tidak saling bertetangga. Oleh karena itu, aturan tentang penduduk negara Islam dan negeri *harbi* bisa dipastikan tidak akan bisa diterapkan sepenuhnya pada saat ini. Akan tetapi bagaimanapun juga pembahasan tentang warganegara negara Islam tidak bisa lepas dari pembahasan tentang penduduk *dar al-Islam*.

Penduduk *dar al-Islam* ada dua golongan yakni Muslimin dan *dhimmi* (*ahl al-dhimmah*).⁷³ Kaum Muslimin dibenarkan berdiam di kawasan Islam atas dasar

⁷³ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 276.

keimanan mereka. Barang siapa yang beriman kepada Risalah Muhammad, maka ia mendapatkan jaminan keamanan atas harta dan jiwanya.⁷⁴ Sedangkan *dhimmi* (*ahl al-dhimmah*) adalah penduduk non-Muslim dari kawasan Islam yang melaksanakan hukum Islam (dalam hal yang tidak berhubungan dengan kepercayaan mereka), dibenarkan menetap untuk selamanya di kawasan Islam tanpa melihat apa agama dan kepercayaan mereka. Boleh jadi mereka terdiri dari orang Kristen, Yahudi, Majusi (pemeluk agama Zoroaster), orang-orang *ṣabi'ah* atau penganut sesembahan yang lain atau pula orang-orang yang tidak mempunyai agama sama sekali.⁷⁵ Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka. Mereka berkedudukan sama dengan kaum Muslimin. Islam menyamakan kaum Muslimin dengan mereka dalam hal-hal yang memang seharusnya sama. Pada soal-soal yang berhubungan dengan keimanan yang mereka anut tentu saja mereka tetap dibebaskan untuk memeluknya. Menyamakan mereka dengan kaum Muslimin dalam soal-soal yang berhubungan dengan keimanan adalah ketidakadilan. Hal itu memang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa non-Muslim tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan tidak boleh dipaksa masuk agama Islam.⁷⁶ Seseorang menjadi *dhimmi* adalah atas dasar adanya perjanjian keamanan. Jaminan keamanan bagi mereka adalah untuk

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., 332.

selama-lamanya, yakni selama mereka menetap di *dar al-Islam*. Mereka berhak untuk tinggal selama-lamanya, dan selama itu pula mereka mendapatkan jaminan keamanan.⁷⁷

Ada dua kondisi yang menjadikan seorang non-Muslim menjadi *dhimmi*. *Pertama*, non-Muslim yang memasuki kawasan Islam dan meminta jaminan keamanan serta mereka berniat untuk tinggal di sana buat selamanya.⁷⁸ *Kedua*, apabila suatu negara telah memaklumkan perang terhadap Islam dan kaum Muslimin, kemudian mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan Islam, lalu penduduknya meminta perlindungan keamanan dengan tetap berada pada agama mereka dan tetap berdiam di negara mereka. Dalam kasus demikian, pemerintah Islam akan melindungi mereka dari setiap serangan maupun penodaan dan pelecehan dari manapun datangnya.⁷⁹ Kewajiban mereka adalah membayar *jizyah* (pajak kepala) berdasarkan firman Allah di dalam surat al-Tawbah ayat 29:

⁷⁷ 'Aliyy Maṣṣūr, *al-Sharī'ah al-Islamiyah Wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm*, 94.

⁷⁸ Ash Shiddieqy, *Hukum Antara Golongan*, 18.

⁷⁹ 'Ali 'Ali Maṣṣūr, *al-Sharī'ah al-Islamiyah Wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm*, 94.

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون (التوبة: ٢٩)

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) diberi al-Kitab sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁸⁰

Di dalam ayat tersebut yang dibolehkan menjadi *dhimmi* (yang membayar *jizyah*) adalah orang-orang yang tergolong ahli kitab (orang-orang Yahudi dan Kristen), ditambah dengan ketentuan al-Sunnah yang memperbolehkan menerima *jizyah* dari orang-orang Majusi (Zoroaster). Adapun orang-orang lain dipersamakan dengan orang-orang Majusi.⁸¹ Oleh karena itu, *jizyah* ini diambil dari siapa saja, artinya semua golongan non-Muslim boleh menjadi *dhimmi*, baik mereka

⁸⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

⁸¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. XI (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), 146.

itu ahli kitab atau orang Majusi, atau pula yang lain, baik mereka orang Arab maupun bukan.⁸²

Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai siapa yang boleh menjadi *dhimmi* dengan imbalan membayar *jizyah*. Malik, al-Awza'i dan ahli-ahli *fiqh* Syam berpendapat bahwa semua non-Muslim boleh menjadi *dhimmi*. Al-Shafi'i berpendapat bahwa ahli kitab baik orang Arab maupun bukan boleh menjadi *dhimmi*, begitu juga orang-orang Majusi. Sedangkan para penyembah berhala secara mutlak tidak boleh menjadi *dhimmi*. Abū Ḥanīfah berkata bahwa bagi orang Arab hanya memiliki dua pilihan, Islam atau pedang (diperangi).⁸³ Artinya, orang-orang Arab tidak boleh menjadi *dhimmi*. Mereka harus menjadi Muslim atau dibunuh. Ibn al-Qayyim berkata, orang-orang Majusi adalah orang-orang musyrik yang tidak mempunyai kitab suci. Dibolehkannya mengambil *jizyah* dari mereka menunjukkan diperbolehkan juga mengambilnya dari semua orang musyrik. Nabi tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab penyembah berhala, karena mereka semua telah masuk Islam sebelum turun ayat tentang *jizyah*. Ayat itu turun sesudah perang Tabuk. Pada waktu itu Rasulullah sudah selesai dari memerangi orang-orang Arab, karena mereka telah masuk Islam semua. Oleh karena itu beliau tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Yahudi yang memerangi beliau, karena ayat ini belum

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

turun. Sesudah turun, beliau mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab yang beragama Kristen serta dari orang Majusi. Kalau seandainya pada waktu itu masih ada penyembah berhala yang membayar *jizyah*, tentulah beliau akan menerimanya, seperti beliau telah menerimanya dari penyembah salib dan penyembah api.

Ketentuan tentang *jizyah* memang tidak mempertimbangkan "tingkat kekafiran". Sebenarnya jika hendak diperbandingkan, kekafiran orang-orang Majusi justru lebih berat daripada kekafiran penyembah berhala. Para penyembah berhala masih meyakini keesaan Allah, tidak ada Pencipta selain Allah. Mereka menyembah berhala dengan alasan "hanya" sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan orang Majusi, para penyembah berhala tidak berkata bahwa di alam ini ada dua pencipta yang satu pencipta kebaikan dan yang lain pencipta kejelekan. Orang-orang Arab penyembah berhala tidak menghalalkan mengawini ibu, anak dan saudara. Orang-orang Arab penyembah berhala adalah sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim *'alayh al-salam*. Orang-orang Majusi tidak mempunyai kitab suci. Mereka tidak memeluk agama Nabi yang manapun, baik dalam aqidah maupun syari'ahnya. Sedangkan orang-orang Arab adalah para pemeluk agama Nabi Ibrahim yang mempunyai *suḥuf* (kitab suci) dan syari'at. Perubahan terhadap agama Ibrahim yang dilakukan oleh orang-orang Arab tidak lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang-orang Majusi terhadap agama dan kitab yang

dibawa oleh Nabi mereka (jika memang benar mereka tadinya mempunyai Nabi dan kitab suci), karena dari mereka tidak diketahui memiliki ketaatan terhadap satu hal pun dari syari'ah Nabi manapun. Sedangkan orang Arab yang masih memperlihatkan tanda-tanda ketaatan kepada Nabi Ibrahim.⁸⁴

Selanjutnya, di samping Muslim dan *dhimmi*, ada lagi golongan lain yang juga dibenarkan berada di dalam kawasan Islam. Golongan ini adalah penduduk kawasan perang (*dar al-harb*) yang tidak beragama Islam, memasuki kawasan Islam untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka untuk sementara waktu. Setelah waktu yang diperjanjikan itu habis maka mereka harus segera meninggalkan kawasan Islam dan tidak lagi mendapatkan jaminan keamanan, terkecuali kalau mereka memang kemudian berkehendak untuk berdiam selamanya di sana dengan meminta status sebagai *dhimmi*.⁸⁵ Untuk keperluan perjalanan di kawasan Islam harus mempunyai "pas jalan". Dengan demikian keamanan terhadap pribadi dan harta mereka akan terjamin. Demikian juga, kebebasan dalam melakukan ajaran agamanya. Sebaliknya mereka harus menghormati agama Islam, tidak mengganggu ketertiban umum dan segera meninggalkan kawasan Islam setelah habis masa itu. Keamanan bagi mereka tetap terjamin sekalipun

⁸⁴ Ibid., 156

⁸⁵ 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, 277.

selama di kawasan Islam mereka melakukan kriminalitas, ataupun karena sesuatu hal izin masuknya dicabut, meskipun ketika itu mereka tidak bisa bebas dari sanksi hukuman. Dalam hal ini izin masuknya dicabut, mereka akan dipulangkan sampai batas negara asalnya dengan tetap mendapatkan jaminan keamanan yang sudah diperjanjikan untuknya.⁸⁶

Dalil dari ketentuan tersebut adalah :

وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون (التوبة: ٦)

Artinya :

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudianlah antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.”⁸⁷

Dengan melihat uraian di atas, yakni karena ketentuan bagi *musta'min* yang menegaskan bahwa ia berada di kawasan Islam hanya untuk sementara waktu saja, maka jelaslah bahwa *musta'min* adalah orang asing. Tidak ada ketentuan bagi dia untuk ikut berperang mempertahankan negara Islam (negeri Islam) dan ia

⁸⁶ Boisard, *Humanisme dalam Islam*, 246.

⁸⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 278.

diwajibkan membayar *jizyah* hanya bila ingin menetap selamanya di *dar al-Islam*, yakni menjadi *dhimmi*.⁸⁸

Di dalam wilayah pemerintahan Islam, hanya Muslim dan *dhimmi*lah yang menjadi warganegara. Kaum Muslimin berhak berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain di dalam kawasan Islam. Boleh bertempat di sana sebagaimana penduduk asli. Mereka bisa menikmati hak-hak dalam bidang politik, sipil dan hak-hak asasi lainnya dan - seperti penduduk asli pula - mereka menyanggah kewajiban-kewajiban yang sama.⁸⁹ Demikian pula halnya dengan *dhimmi*. Ia tidak dipandang orang asing bagi daerah negara manapun yang ada di kawasan Islam. Tiap-tiap pemerintah atau negara yang ada di *dar al-Islam* dipandang sebagai pemerintah dan negaranya sendiri.⁹⁰ Muslim dan *dhimmi* tidak boleh dihalangi untuk masuk ke dalam negara manapun di kawasan Islam.⁹¹ Itu adalah norma semula yang dipikirkan oleh para *fuqaha*. Akan tetapi kenyataan bahwa dunia Islam terdiri dari beberapa negara menyebabkan adanya peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur perpindahan keluar/masuk dari/ke negara-negara tersebut. Walaupun pada dasarnya Muslim dan *dhimmi* itu dengan bebas bisa menjadi warganegara dari negara manapun, akan tetapi masing-masing

⁸⁸ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: The John Hopkins Press, 1960), 163.

⁸⁹ 'Aliyy Manṣūr, *al-Sbarī'ah al-Islamiyah Wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm*, 93.

⁹⁰ Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, 42-43.

⁹¹ Ibid., 42.

pemerintah negara Islam dalam keadaan yang mendesak boleh membuat peraturan bagi orang yang keluar/masuk dari/ke wilayah sekedar menurut kepentingan.⁹²

C. Orang Asing

Para ulama' berbeda pendapat mengenai jangka waktu yang diberikan kepada orang asing (*musta'min*) untuk tinggal di *dar al-Islam*. Menurut pendapat Abu Ḥanīfah, al-Shāfi'i dan sebagian ulama' Ḥanbaliyah, jangka waktu itu paling lama adalah satu tahun. Malik tidak menetapkan batas waktu. Menurut Al-Shāfi'i, hukum asalnya adalah tidak boleh lebih dari empat bulan, kecuali kalau diizinkan oleh kepala negara dan pula maslahatnya.⁹³ Diberitakan pula bahwa mazhab Ḥanbali memperbolehkan *musta'min* berada di *dar al-Islām* sampai selama 10 tahun.⁹⁴

Tidak adanya dalil yang pasti mengenai ketentuan ini telah menyebabkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini bermanfaat untuk memberikan keleluasan kepada pembuat undang-undang untuk memilih salah satu pendapat itu dengan melihat kepentingan umum artinya selama hal itu tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu *musta'min* mempunyai dua kemungkinan bagi kedudukannya di dalam *dar al-Islam*, yakni mungkin dia bisa menjadi penduduk dan mungkin pula tidak. Ia mungkin bisa berkedudukan sebagai penduduk *dar al-*

⁹² Ibid., 43.

⁹³ Ibid., 44.

⁹⁴ Khadduri, *War and Peace*, 163.

Islam maupun negara Islam misalnya pemerintah Islam mempunyai aturan yang menentukan bahwa orang asing akan menjadi penduduk bila ia masuk ke dalam negara Islam dengan sah, kenyataannya berada di wilayah negara Islam atau ia telah berada di negara Islam selama tiga tahun. Dengan demikian seorang *musta'min* telah memenuhi syarat-syarat itu, jika pemerintah Islam memilih pendapat-pendapat yang membolehkan izin selama sepuluh tahun. Dengan demikian pula, *musta'min* ini adalah orang asing yang menjadi penduduk negara Islam. Sebaliknya, mungkin saja ia tidak bisa mempunyai status sebagai penduduk, jika peraturan-peraturan yang ada memang tidak memungkinkannya. Hal ini merupakan kebijakan yang diserahkan kepada otoritas pemerintah.

Pembagian dunia menjadi dua kawasan tersebut di atas membawa akibat pula kepada pengertian *musta'min* yang diberikan, sehingga *musta'min* selalu didefinisikan sebagai "orang-orang *ḥarbi*", yakni penduduk non-Muslim dari "kawasan perang", seperti yang didefinisikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, yaitu "orang *ḥarbi*" yang masuk ke negara Islam bukan dengan maksud menetap, tetapi untuk waktu tertentu.⁹⁵ Sedangkan penduduk selain kawasan perang yang masuk ke dalam kawasan Islam boleh dikatakan tidak pernah disinggung. Artinya apakah penduduk *dar al-'abd* (kawasan persetujuan) dan *dar al-silm* (kawasan netral) yang berada di kawasan Islam untuk sementara waktu dinamakan *musta'min* juga? Karena pada

⁹⁵ Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, 128.

masa kini dunia Islam pun telah menerima dan mengirimkan para duta besar dan utusan lain dari dan ke negara sahabat.

Menurut hemat penulis, tidak ada halangan untuk menamakan mereka *musta'min* juga, karena *musta'min* berarti orang yang meminta *aman* (jaminan keamanan) yang pada mulanya tentu saja mereka belum memperolehnya. Terlepas dari masalah istilah apa yang diberikan kepada mereka, yang jelas non-Muslim yang berada di kawasan Islam untuk sementara waktu tetap dipandang sebagai orang asing, yang di dalam hukum Islam dikatakan orang asing yang mendapatkan *aman* (jaminan keamanan). *Aman* ini bisa diberikan baik oleh *imam* (kepala negara) atau wakilnya dengan *muhādanah* atau *muwada'ah* (perletakan senjata), juga boleh diberikan oleh orang Islam biasa secara perorangan. Yang pertama dinamakan *aman* yang resmi sedangkan yang kedua adalah *aman* yang tidak resmi.⁹⁶

Aman (jaminan keamanan) dalam keadaan biasa berakhir ketika waktu yang diperjanjikan sudah habis atau ketika yang bersangkutan meninggalkan kawasan Islam. Apabila dia ingin kembali ke kawasan Islam, dia harus mendapatkan *aman* yang baru. *Aman* ini bisa tidak diberikan dan *musta'min* diusir oleh *imam* (kepala negara) ketika terbukti bahwa ia mempunyai maksud jahat yang tersembunyi atau bila *imam* berpendapat bahwa

⁹⁶ Khadduri, *War and Peace*, 164.

pemberian *aman* itu akan bertentangan dengan kepentingan Muslim. Imam juga boleh menghukum Muslim yang memberi *aman* kepada seseorang yang terbukti melakukan hal-hal yang dipandang membahayakan masyarakat.⁹⁷ Pemerintah diperbolehkan membuat aturan lain yang lebih terperinci dan sesuai dengan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena memang dalam soal-soal keduniaan hukum Islam hanya menetapkan pokok-pokoknya saja. Hal itu terutama karena gaya legislasi al-Qur'an sendiri memberikan kesempatan seperti itu. Kajian-kajian terhadap ayat-ayat hukum di dalamnya membuahkan teori pemilahan antara ayat yang *qaf'i* dan ayat yang *ẓanni*. Gagasan pemilahan ini hendak menunjukkan di tempat manakah manusia harus tunduk sepenuhnya, dalam arti tidak banyak melakukan penalaran terhadap apa yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, dan di mana pula ia dibenarkan melakukan penafsiran. Setidaknya pemilahan itu memberitahu para pemikir bahwa ada ayat-ayat yang cenderung berfungsi menciptakan pembakuan dan ada pula yang cenderung memberikan kesempatan untuk dinamika. Dengan ungkapan lain, mestilah disadari bahwa hukum Tuhan memang ada yang dirancang menjadi baku, di mana segala perubahan dalam masyarakat manusia mesti tunduk pada pembakuan itu, dan ada pula yang dirancang untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.

⁹⁷ Ibid., 168-169.

Dalam hal ini, Imran Ahsan Khan Nyazee menggunakan istilah *the fixed part* untuk menyebut bagian baku dari hukum Islam dan *the flexible part* untuk menyebut bagian yang lentur.⁹⁸

Aman memberikan kemungkinan bagi Muslim dan non-Muslim untuk membina hubungan damai yang bersifat sementara, yang tanpa itu tidak mungkin ada. Dengan demikian, mereka dapat saling berkunjung untuk berbagai keperluan. *Aman* di sini berkedudukan sebagai surat keterangan untuk bepergian yang dipergunakan oleh orang asing selama dia berada di kediaman sementara, yakni di kawasan Islam. Pertukaran barang-barang kebutuhan antara Muslim dan non-Muslim tentulah tidak mungkin terjadi jika mereka tidak diperbolehkan meninggalkan atau memasuki kawasan Islam. *Aman* ini mengatur kebutuhan yang tak terhindarkan untuk melintasi perbatasan, yang tanpa itu kegiatan liar justru akan menaikkan tingkat ketegangan antara dua kawasan itu yang secara resmi memang tidak memiliki perjanjian damai. Pemberian *aman* yang sering dilakukan, terutama ketika perang berakhir, akan memudahkan pembinaan hubungan dagang yang normal antara pedagang-pedagang Muslim dan mereka yang berada di luar tapal batas kawasan Islam.⁹⁹

⁹⁸ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 52.

⁹⁹ Khadduri, *War and Peace*, 168-169.

D. Islam dan Teori Kewarganegaraan

Di dalam soal kewarganegaraan dikenal dua asas, yakni *ius soli* dan *ius sanguinis*. Asas *ius soli* adalah kewarganegaraan yang ditetapkan menurut daerah atau negara tempat seseorang dilahirkan. Jadi seseorang yang lahir di negara A, menjadi warganegara dari negara tersebut. Asas *ius sanguinis* adalah kewarganegaraan yang ditetapkan menurut darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan dari orangtuanya, dengan tidak melihat di mana orang tuanya berada atau dilahirkan. Orang asing dapat masuk menjadi warganegara dari suatu negara. Caranya adalah dengan jalan naturalisasi atau pewarganegaraan. Syarat naturalisasi ini diatur oleh hukum positif dari masing-masing negara.¹⁰⁰

Adalah hak setiap negara menggunakan asas mana dalam menentukan siapa-siapa warganegaranya. Hal ini tidak lepas dari latar belakang sejarah pembentukan dan letak dari suatu negara. Kemungkinan terjadi bahwa bagi suatu negara lebih menguntungkan untuk menganut asas *ius soli*. Bahkan dalam perkembangan kemudian akan ternyata bahwa adakalanya kedua asas itu harus dipakai bersamaan untuk mencegah kemungkinan *apatride* (orang

¹⁰⁰ Soekarno, *Tatanegara Republik Indonesia*, (Bukittinggi-Jakarta: NV. Nusantara, 1962), 10.

tanpa kewarganegaraan) atau *bipatride* (orang dengan kewarganegaraan ganda).¹⁰¹

Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dikenal konsep tentang kewarganegaraan seperti yang dikenal sekarang ini. Yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam adalah ide-ide tentang *ummah* (umat), *dhimmi*, *musta'min* dan *harbi*. Tidak dikenal istilah yang searti dengan istilah warganegara seperti yang kini dikenal. Dari pembahasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa seseorang dibenarkan berada di kawasan Islam karena dua hal yaitu iman dan *aman*. Iman artinya Islam, sedangkan *aman* adalah perjanjian jaminan keamanan. Barangsiapa beriman kepada Risalah Muhammad SAW, artinya masuk Islam, maka terpeliharalah jiwa dan hartanya karena Islam. Barangsiapa masuk ke dalam *aman* kaum Muslimin dengan perjanjian *aman*, maka terpeliharalah jiwa dan hartanya karena *aman* itu tadi walaupun ia tetap memeluk agama mereka.¹⁰² *Aman* ada dua macam, *aman* sementara dan *aman* untuk selamanya. *Aman* untuk selamanya ini memberikan status *dhimmi* kepada seseorang, sedangkan *aman* untuk sementara waktu memberikan status *musta'min*.¹⁰³

Bila dilihat dari segi hak dan kewajiban, maka yang identik dengan apa yang diistilahkan dengan warganegara

¹⁰¹ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara FH UI, 1980), 275.

¹⁰² 'Awdah, *al-Tashri' al-Jinai al-Islami*, 276.

¹⁰³ Ibid., 276-277.

adalah orang Muslim dan *dhimmi*. Muslim karena Islamnya dan *dhimmi* karena *aman*nya. Adapun Muslim yang berada di kawasan perang dan tidak berpindah ke kawasan Islam, maka menurut Imam Malik, Imam Al-Shāfi'i dan Imam Ahmad ia sama dengan Muslim di kawasan Islam, yakni terjamin harta dan jiwanya karena Islamnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pemerintah Islam tidak bisa menjaganya karena menurutnya, ke-Islaman saja tidak cukup sebagai jaminan keamanan, melainkan harus ditambah dengan kenyataan bahwa ia berada di bawah naungan pemerintah Muslim.¹⁰⁴ Menjadi warganegara dari negara Islam karena ke-Islaman dan *aman* ini tampak sebagai kaidah yang tidak ada sangkut pautnya dengan asas *ius soli* atau pun *ius sanguinis*, akan tetapi lebih dekat dengan apa yang diistilahkan dengan naturalisasi atau perwarganegaraan.

E. Perkawinan, Keturunan dan Status Kewarganegaraan

'Abd al-Qādir 'Awdah berpendapat bahwa kebangsaan menurut syari'at Islam didasarkan atas asas teritorial (berkumpul dalam satu wilayah negara) atau bisa juga atas dasar kesamaan agama Islam dan kesediaan mematuhi hukum-hukumnya.¹⁰⁵ Siapapun yang memenuhi syarat itu dianggap sebagai satu bangsa, baik mereka Muslim atau bukan. Di sini yang penulis perhatikan adalah penyebutan "kebangsaan" tersebut.

¹⁰⁴ Ibid., 278.

¹⁰⁵ Ibid., 307.

Tampaknya apa yang dimaksudkan 'Awdah dengan istilah kebangsaan itu tak lain adalah kewarganegaraan. Di banyak tempat ia tampaknya mencampur istilah kewarganegaraan dengan kebangsaan, misalnya ketika membahas soal kebangsaan. Di situ ia mengaitkannya juga dengan masalah perubahan status yang berkenaan dengan Muslim, *dhimmi* dan *musta'min*. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya bahwa penduduk kawasan Islam dipandang satu bangsa, baik dia Muslim ataupun *dhimmi*,¹⁰⁶ serta pengulangannya untuk menyebutkan perbedaan pendapat imam-imam madhab mengenai orang Islam yang berada di luar kawasan Islam yang juga sudah dibahas di atas. Oleh karena itu soal pengaruh perkawinan dan keturunan terhadap kewarganegaraan akan diambilkan dari penjelasannya soal kebangsaan yang dikaitkan kedua faktor tersebut.

Menurut 'Awdah, perkawinan tidak dapat merubah kebangsaan (kewarganegaraan) atau tidak bisa menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan negara Islam hanya bisa diperoleh dengan memeluk agama Islam dan berjanji untuk mengikuti hukum-hukumnya (yakni menjadi Muslim atau *dhimmi*) serta bermukim selamanya di negara tersebut. Perubahan kewarganegaraan suami tidak berpengaruh kepada kewarganegaraan istri.¹⁰⁷ Anak-anak yang masih kecil dan juga mereka yang berstatus hukum sama dengan anak kecil, seperti orang gila, mengikuti kewarganegaraan orangtuanya. Apabila kedua orangtuanya masuk Islam

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid., 308.

atau menjadi *dhimmi* anak mereka yang berada di bawah umur mengikuti status mereka. Apabila ibu saja yang menjadi Muslimah atau *dhimmiyah* dari statusnya yang *harbiyah*, maka menurut pendapat Imam Abū Ḥanifah, Imam al-Shāfi'i dan Imam Aḥmad, anak mereka yang belum dewasa akan mengikutinya. Menurut Imam Malik, anak-anak mengikuti ayahnya. Akan tetapi orangtua tidak bisa menyebabkan perubahan status kewarganegaraan anak-anak mereka jika perubahan itu menuju ke status yang lebih rendah. Artinya jika orangtua keluar dari agama Islam, maka anak-anak mereka tidak mengikuti perubahan itu. Anak mereka tetap menjadi warganegara dari negara Islam. Demikian juga apabila yang keluar dari Islam hanya salah satu dari orangtuanya saja.¹⁰⁸

Yang dikatakan anak dalam hukum Islam adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, artinya bukan anak angkat dan bukan pula anak hasil dari perzinahan. Anak zina hanya merupakan keturunan ibunya saja, sedangkan dengan bapak biologisnya ia tidak mempunyai hubungan apa-apa.¹⁰⁹ Anak angkat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan apa pun dengan orangtua angkatnya, artinya dia tidak akan memperoleh status anak sendiri dari orangtua angkatnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah di dalam surat al-Aḥzab ayat 4. Sebagian dari ayat tersebut menentukan :

¹⁰⁸ Ibid., 308-309.

¹⁰⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī), 454-455.

وما جعل أدياءكم أبناءكم (الأحزاب: ٤)

Artinya :

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri”.¹¹⁰

Anak yang tidak diakui oleh ayahnya (dipungkiri), maka jika persyaratan dari sangkalan itu telah lengkap (seperti yang dibahas dalam hukum Islam tentang *li'an*) maka anak itu bukan anaknya, sehingga tidak mengikuti kewarganegaraan laki-laki tersebut.¹¹¹ Di dalam hukum Islam diatur juga masalah *iqrar* (pengakuan) untuk menetapkan *nasab* seorang anak dengan syarat-syarat tertentu. *Iqrar* ini tidak sama dengan pengangkatan anak.¹¹² Adapun anak yang tidak diketahui siapa orangtuanya dan diketemukan di dalam kawasan Islam, maka dia diberi status seorang Muslim. Adapun apabila dia diketemukan oleh non-Muslim di daerah yang khusus dihuni oleh non-Muslim, maka anak ini dianggap seagama dengan penemunya.¹¹³

Seperti yang telah diterangkan, bahwa hukum Islam yang berkenaan dengan masalah-masalah keduniaan ditetapkan berdasarkan teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, usaha untuk memerincinya adalah tugas abadi yang harus diemban oleh para pemikir hukum dalam masyarakat

¹¹⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 666.

¹¹¹ Zakariyya Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Awlad*, (Kairo: al-Dār al-Qawmiyah, 1964), 17.

¹¹² Ibid., 19.

¹¹³ Ibid., 24-25.

Islam untuk menyediakan aturan yang memadai untuk kepentingan percaturan dunia modern, dan dalam waktu yang sama tetap berpegang pada aturan pokok yang telah digariskan.

Ringkasan

- Hukum Islam membagi kawasan dunia menjadi dua bagian yakni *dar al-Islam* (kawasan damai atau kawasan Islam) dan *dar al-harb* (kawasan perang). Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di antara *dar al-Islam* dengan *dar al-harb* ada kawasan lain yang dinamakan *dar al-'abd* (kawasan persetujuan) dan *dar al-silm* (kawasan netral).
- *Dar al-Islam* yang diperintah oleh pemerintah Islam sekaligus dinamakan negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*).
- Menurut hukum Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dapat diterima menjadi warganegara negara Islam. Warga negara non-Muslim dinamakan *dhimmi*.
- Seorang Muslim menjadi warganegara dari negara Islam karena "ke-Islaman"-nya sedang non-Muslim karena *amannya* yakni perlindungan keamanan untuk selamanya dari negara maupun dari perorangan.
- Orang asing adalah mereka yang bukan warganegara Islam. Mereka dapat masuk ke dalam wilayah negara Islam dengan *aman* yang bersifat sementara yakni berstatus sebagai *musta'min*.

وما جعل أدياءكم إبناءكم (الأحزاب: ٤)

Artinya :

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri”.¹¹⁰

Anak yang tidak diakui oleh ayahnya (dipungkiri), maka jika persyaratan dari sangkalan itu telah lengkap (seperti yang dibahas dalam hukum Islam tentang *li'an*) maka anak itu bukan anaknya, sehingga tidak mengikuti kewarganegaraan laki-laki tersebut.¹¹¹ Di dalam hukum Islam diatur juga masalah *iqrar* (pengakuan) untuk menetapkan *nasab* seorang anak dengan syarat-syarat tertentu. *Iqrar* ini tidak sama dengan pengangkatan anak.¹¹² Adapun anak yang tidak diketahui siapa orangtuanya dan diketemukan di dalam kawasan Islam, maka dia diberi status seorang Muslim. Adapun apabila dia diketemukan oleh non-Muslim di daerah yang khusus dihuni oleh non-Muslim, maka anak ini dianggap seagama dengan penemunya.¹¹³

Seperti yang telah diterangkan, bahwa hukum Islam yang berkenaan dengan masalah-masalah keduniaan ditetapkan berdasarkan teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, usaha untuk memerincinya adalah tugas abadi yang harus diemban oleh para pemikir hukum dalam masyarakat

¹¹⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 666.

¹¹¹ Zakariyya Aḥmad al-Barri, *Aḥkam al-Awlad*, (Kairo: al-Dār al-Qawmiyah, 1964), 17.

¹¹² Ibid., 19.

¹¹³ Ibid., 24-25.

Islam untuk menyediakan aturan yang memadai untuk kepentingan percaturan dunia modern, dan dalam waktu yang sama tetap berpegang pada aturan pokok yang telah digariskan.

Ringkasan

- Hukum Islam membagi kawasan dunia menjadi dua bagian yakni *dar al-Islam* (kawasan damai atau kawasan Islam) dan *dar al-harb* (kawasan perang). Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di antara *dar al-Islam* dengan *dar al-harb* ada kawasan lain yang dinamakan *dar al-'abd* (kawasan persetujuan) dan *dar al-silm* (kawasan netral).
- *Dar al-Islam* yang diperintah oleh pemerintah Islam sekaligus dinamakan negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*).
- Menurut hukum Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dapat diterima menjadi warganegara negara Islam. Warga negara non-Muslim dinamakan *dhimmi*.
- Seorang Muslim menjadi warganegara dari negara Islam karena “ke-Islaman”nya sedang non-Muslim karena *amannya* yakni perlindungan keamanan untuk selamanya dari negara maupun dari perorangan.
- Orang asing adalah mereka yang bukan warganegara Islam. Mereka dapat masuk ke dalam wilayah negara Islam dengan *aman* yang bersifat sementara yakni berstatus sebagai *musta'min*.

BAB IV

PENDUDUK NON-MUSLIM DI DALAM NEGARA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Sikap Islam Terhadap Non-Muslim

Asas persamaan derajat di antara manusia pertamanya ditegakkan secara normatif oleh penegasan al-Qur'an bahwa Allah telah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan mereka sama-sama diberi kedudukan yang mulia sebagai manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹⁴

Di tempat lain Allah berfirman :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الاسراء : ٧٠)

Artinya :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹¹⁵

Prinsip seperti ini disiapkan rinciannya lebih lanjut oleh Rasulullah. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar kaum Muslimin membina hubungan yang penuh dengan kasih sayang terhadap semua manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr :

¹¹⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

¹¹⁵ Ibid., 435.

عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : الراحمون
يرحمهم الرحمن ارحموا أمل الأرض يرحمكم من في السماء (رواه ابو
داود).¹¹⁶

Artinya :

Dari 'Abdullah bin 'Amr, Nabi Muḥammad SAW bersabda, "Orang yang bersifat pengasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya engkau sekalian akan dikasihi pula oleh penghuni langit".

Kasih sayang itu diberikan kepada seluruh manusia tanpa memandang perbedaan agama. Adanya ketentuan itu mengingat bahwa pada hakikatnya adanya perbedaan agama di antara manusia ini sebenarnya memang sudah menjadi kehendak Allah, sebagaimana firmanNya:

ولولياء ربك لا آمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين (يونس ٩٩)

Artinya :

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini semuanya. Maka

¹¹⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawūd*, Vol. II, (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī), 572.

apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?¹¹⁷

Ayat ini menjadi dasar sikap seseorang Muslim terhadap non-Muslim, artinya perbedaan itu sudah menjadi kewajiban dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memusuhi orang lain, mencela dan memperlakukan mereka semena-mena. Selanjutnya, tenggang rasa antar golongan telah dicontohkan juga di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sejak awal beliau diutus sebagai Rasul sampai dengan akhir hayat beliau. Sepak terjang beliau penuh dengan keteladanan tentang sikap beliau dan pengikutnya yang toleran dengan non-Muslim.

Pada periode Makkah, kaum Muslimin banyak menderita akibat penganiayaan non-Muslim, padahal Nabi dan kaum Muslimin tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Rasul hanyalah penyampai saja. Adapun manusia mau menerima ajaran Islam atau tidak, hal itu bukan tanggung jawab beliau dan kaum Muslimin.¹¹⁸ Kemudian tidak lama sesudah itu, hanya lebih kurang delapan tahun kemudian, kaum Muslimin yang pada waktu itu telah berhijrah ke Madinah, melakukan penaklukan kota Makkah. Ketika itu mereka merupakan pasukan yang sangat kuat dan tidak ada tara

¹¹⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 322.

¹¹⁸ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 134-137.

bandingannya. Penduduk kota Makkah yang dahulu menganiaya kaum Muslimin kini sudah menyerah di hadapan mereka. Seandainya kaum Muslimin berkehendak, niscaya mereka bisa dengan leluasa melancarkan balas dendam. Akan tetapi ternyata mereka memberikan ampunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam, dan penaklukan atas kota Makkah pun berjalan dengan damai tanpa pertumpahan darah.¹¹⁹ Demikian pula, setelah Rasul berdiam di Madinah, beliau menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang intinya antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi terdapat persamaan hak kewarganegaraan, sekalipun orang-orang Yahudi itu sebenarnya hanya berstatus pengungsi.¹²⁰

Lebih dari itu, Rasulullah telah mengikrarkan diri beliau sebagai pembela golongan non-Muslim dari kemungkinan ketidakadilan:

عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معا مدا أو انتقصه

¹¹⁹ Ibid., 177.

¹²⁰ Ibid., 138-140 dan 142.

أوكفه فوق طاقته أوأخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم
القيامة (رواه ابوداود).^{١٢١}

Artinya :

Dari para sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh sejumlah anak-anak mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, barangsiapa yang berbuat semena-mena kepada *mu'abid* (*dhimmi*), mengurangi haknya, membebaninya dengan beban di luar batas kemampuannya atau mengambil sesuatu miliknya dengan paksa maka aku sendirilah yang akan menjadi penuntutnya nanti pada hari kiyamat."

Islam menyamakan Muslim dengan non-Muslim dalam banyak urusan. Non-Muslim mendapatkan kebebasan pribadi, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajarannya. Demikian juga menghormati hak milik, hak hidup dan kehormatan mereka serta hak ekonomi. Mereka pun mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.¹²² Walaupun al-Qur'an kadang-kadang dengan keras menyerang orang-orang Yahudi dan dengan cara yang lebih lunak kepada orang-orang Nasrani dengan menuduh bahwa mereka telah memalsukan kitab suci mereka, namun Islam tidak mengaku sebagai satu-satunya

¹²¹Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, 152.

¹²² 'Abd al-Ḥamid Mutawalliyy, *Mabādī' Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, (Iskandariyah: al-Ma'arif, 1978), 392-393.

agama yang berhak hidup. Konsekuensinya, secara eksplisit Islam mengakui pluralitas masyarakat.¹²³

Akan tetapi perlu diketahui di sini bahwa bagaimanapun juga menyamakan secara mutlak antara Muslim dengan *dhimmi* (non-Muslim) adalah tidak mungkin. Persamaan itu juga tidak terjadi di dalam negara manapun yang sejarah berdirinya dilatarbelakangi oleh ideologi atau faktor-faktor keagamaan tertentu. Di negara-negara Barat, walaupun tidak ada cekalan secara eksplisit, masyarakat yang menganut agama-agama ketimuran tidak dapat tampil dalam jabatan-jabatan publik, apalagi sampai mencapai puncak karier politik maupun pemerintahan. Hal ini sudah merupakan kenyataan, walaupun negara-negara itu dikenal sebagai negara-negara yang paling menghormati hak-hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap komunitas agama atau minoritas tertentu dalam batas-batas tertentu mungkin tidak terhindarkan. Negara-negara ini menganggap cukup dengan bersikap toleran kepada rakyatnya. Tuntutan tentang hak-hak yang lebih dari apa yang ada sekarang untuk saat ini, yaitu yang berupa jaminan negara terhadap sejumlah banyak kepentingan mereka yang meliputi kebebasan pribadi, keamanan bagi harta, kehormatan, kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajarannya, mungkin menjadi sesuatu yang *absurd*. Seperti itu juga yang mungkin terjadi di dalam negara yang berasaskan

¹²³ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 241.

Islam. Tetapi hal itu sebanding saja dengan ketentuan bahwa persamaan yang persis dalam soal-soal kewajiban adalah tidak mungkin. Dalam literatur *fiqh siyāsah* sudah dipastikan bahwa hal-hal seperti kewajiban membela negara hanyalah dipikulkan kepada kaum Muslimin saja. Oleh karena itu hak-hak kedua pihak itu berbeda. Jadi kalau di sana terdapat beberapa perbedaan dalam batas-batas tertentu antara Muslim dengan non-Muslim, maka hal itu adalah sesuatu yang dapat diterima.¹²⁴

B. Kewajiban-kewajiban Penduduk Non-Muslim

Non-Muslim menjadi warganegara dari negara Islam dengan apa yang dinamakan *'aqd al-dhimmah* (perjanjian untuk menjadi *dhimmi* atau bisa dikatakan pewarganegaraan), lalu menjadilah ia seorang *dhimmi*. *'Aqd al-dhimmah* itu dibuat dengan dua syarat, yaitu menaati hukum Islam secara garis besar dan membayar *jizyah*.¹²⁵

1. Menaati Hukum Islam Secara Garis besar

Syari'at Islam menyamakan antara kaum Muslimin dengan para *dhimmi* di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at, yakni dalam bidang hukum tertentu, yang biasanya tergolong dalam hukum publik. Untuk hukum-hukum yang bersifat personal, sudah tentu berlaku hukum yang berbeda. Perbedaan antara *dhimmi*

¹²⁴ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizām al-Hukm fi al-Islām*, 395-396.

¹²⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. XI, (Kuwait: Dar al-Bayān, 1968), 140.

dan orang-orang Islam pada prinsipnya dalam hal yang bersangkutan paut dengan keimanan, di mana rasa keadilan akan menuntut supaya bidang hukum yang ada kaitannya dengan soal keimanan tidak diganggu, sehingga tidaklah bisa diterima jika *dhimmi* ditundukkan kepada ketentuan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Di samping alasan di atas, menyamakan Muslim dengan *dhimmi* secara mutlak berarti keluar dari kaidah pokok syari'at Islam tentang kebebasan,¹²⁶ yaitu sebagaimana termaktub di dalam firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).¹²⁷

Maka dari itu, dalam masalah pidana yang menjadi titik tolak pembeda antara Muslimin dengan *dhimmiyin* adalah tindak pidana yang ditetapkan dengan asas agama murni. Misalnya minum-minuman keras dan memakan daging babi. Islam mengharamkan keduanya, dan sudah semestinya kalau itu diterapkan kepada orang Islam. Akan tetapi adalah tidak adil menerapkannya kepada non-Muslim yang misalnya berkepercayaan bahwa minuman keras dan daging babi tidak terlarang. Kalau dalam hal ini dengan membabi buta disamakan saja antara kedua golongan ini tentulah berarti non-Muslim dihukum

¹²⁶ 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, vol. I, 332.

¹²⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

karena berbuat sesuatu yang menurut agama mereka tidak dilarang, dan ini tidak adil. Adapun yang adil adalah membatasi larangan itu hanya untuk orang-orang Islam saja, tanpa mengikut sertakan golongan lain, dan yang terkena sangsi hukuman hanya orang-orang Islam saja. Akan tetapi *dhimmi* diancam pidana jika dia melakukan tindak pidana yang menurut keyakinan mereka dilarang atau yang dianggap tercela atau bila kelakuan mereka itu bertentangan dengan moral umum atau pula menyinggung perasaan orang lain. Kita ambil contoh misalnya minum minuman keras tidak dilarang oleh agama orang-orang *dhimmi*, akan tetapi pemerintah Islam bisa saja melarang mereka mabuk di depan umum atau secara terang-terangan (*demonstratif*) dengan alasan hal itu menodai moralitas umum. Yang akan diberlakukan bagi mereka adalah bahwa mereka hanya dipidana karena mabuknya, bukan minumannya. Barangsiapa meminum hingga mabuk, akan dipidana. Akan tetapi yang tidak sampai mabuk tidak dihukum. Sementara itu, orang Islam akan dipidana karena mengkonsumsi minuman keras sekalipun tidak sampai mabuk, atau "hanya" mabuk di tempat tersembunyi.

Syari'at Islam mewajibkan berpuasa bagi Muslim serta tidak berpuasa atau terang-terangan makan di tempat terbuka dianggap suatu kedurhakaan. Akan tetapi yang dihukum karena tidak berpuasa hanyalah orang Islam, non-Muslim tidak, karena agama mereka tidak mewajibkannya. Kalau golongan ini dihukum juga, ini

berarti ketidakadilan, artinya mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka imani. Sedangkan paksaan untuk memasuki agama itu tidak dibenarkan. Adapun tidak berpuasa secara terang-terangan di muka umum, pelakunya akan dihukum baik ia Muslim atau *dhimmi*, karena *dhimmi* telah mentaati atau berjanji untuk mentaati hukum Islam secara global, maka wajiblah ia meninggalkan setiap perbuatan yang mengganggu syi'ar Islam dan perasaan umat Islam. Jadi persoalannya bukan berpuasa atau tidak berpuasa, akan tetapi secara terbuka dan terang-terangan menampakkan makan dan minum di tengah masyarakat yang tengah berpuasa, karena hal ini dapat mengganggu syi'ar puasa dan menyinggung perasaan umat Islam yang sedang berpuasa. Oleh karena itu apabila non-Muslim makan dan minum di tempat tertutup di saat kaum Muslimin menjalankan ibadah puasa, mereka tidak terkena sanksi apa-apa, karena puasa ini memang tidak wajib bagi mereka.¹²⁸

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan tentang berlakunya hukum Islam bagi para *dhimmi* adalah bahwa mereka sepenuhnya diberi keleluasaan untuk menjalankan peribadatan dan seluruh ajaran agama mereka. Perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun yang diperintahkan berdasarkan syari'at Islam hanya berlaku untuk umat Islam saja, sedang non-Muslim tidak diwajibkan mentaatinya, kecuali kalau ketaatan mereka itu diperlukan untuk menjaga ketenteraman dan kepentingan

¹²⁸ Ibid.

umum. Hadis Nabi yang menegaskan larangan berbuat semena-mena kepada *dhimmi* menjadi pedoman agar pemerintah Islam tidak merugikan mereka yang semestinya tidak perlu terjadi.

2. Membayar *Jizyah*

Jizyah adalah sejumlah harta yang diwajibkan atas masing-masing perseorangan yang berdiam di dalam kawasan pemerintahan (negara) Islam. *Jizyah* ini hanya diwajibkan kepada sebagian dari para *dhimmi* yakni terbatas kepada para *dhimmi* yang memiliki kemampuan menjalani bela negara saja, meskipun mungkin karena satu dan lain hal mereka menjadi tidak wajib menjalaninya.¹²⁹ Secara historis, peraturan tentang *jizyah* ini bukanlah Islam yang menciptakannya, akan tetapi sudah ada sejak permulaan masa peradaban kuno. Negara Yunani kuno telah mewajibkan pembebanan *jizyah* terhadap penduduk yang berdiam di daerah pantai Asia Kecil sekitar abad ke 5 sebelum Masehi. *Jizyah* tersebut berkedudukan sebagai imbalan dari jaminan keamanan terhadap ancaman serangan bangsa Punisia yang pada waktu itu menjadi jajahan Persia. Penduduk daerah pantai itu tidak berkeberatan untuk membayarnya sebagai imbalan jaminan keamanan tadi. Kerajaan Romawi ketika menaklukkan daerah yang kini menjadi wilayah Perancis, mewajibkan masing-masing penduduknya membayar *jizyah* yang bermacam-macam jumlahnya mulai dari 9

¹²⁹ Ahmad 'Aṭṭiyat Allāh, *al-Qāmus al-Islāmī*, vol. I, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1963) 209.

sampai dengan 15 pound per tahunnya atau tujuh kali lipat dari *jizyah* yang pernah ditetapkan oleh pemerintah Muslim.¹³⁰ Pemerintah kerajaan Persia juga menarik *jizyah* dari rakyatnya. Kaisar Anushirwan mewajibkannya dengan beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat ekonomi seseorang apakah ia kaya atau miskin. Dikecualikan dari pembayaran ini para keluarga istana, tentara, pemeluk agama dan para penulis serta orang-orang yang mengabdikan kepada raja. Setiap orang membayar menurut kemampuannya mulai 4 sampai 12 *dirham*.¹³¹

Jadi, orang-orang Arab mengambil kata dan arti *jizyah* ini dari Persia, kemudian mereka meng-Arabkan sehingga menjadi "*jizyah*" dan berbuat adil dalam cara-cara pengumpulannya. Orang-orang Arab tidak mewajibkannya atas Muslim seperti yang dilakukan oleh Anushirwan juga, karena menurut mereka Muslimin adalah para tentara, pembesar dan keluarganya yang oleh Anushirwan juga tidak diwajibkan.¹³²

Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan kadar *jizyah* menurut keadaan dan menurut kesempatan dengan para wajib bayarnya.¹³³ Penduduk Najran bersedia membayar *jizyah* dengan jumlah 2000 *hillah* setiap bulan Safar dan 1000 *hillah* setiap bulan Rajab. Satu *hillah*

¹³⁰ Jarjī Zaydan, *Tarīkh al-Tamadduni al-Islāmī*, vol. I, (Kairo: Dār al-Hilāl, t.t.), 227-228.

¹³¹ Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tarīkh*, vol. I, (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1965), 455.

¹³² Zaydan, *Tarīkh al-Tamaddun al-Islāmī*, 228.

¹³³ Ibid.

seharga satu *awqiyah* sedang satu *awqiyah* senilai 40 *dirham*. Penduduk Adhrukh membayar 100 *dinar* setiap bulan Rajab. Penduduk Maqna membayar seperempat dari hasil kayu bakar mereka, perhiasan, ternak, baju besi serta buah-buahan mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi.¹³⁴ Orang-orang Yahudi lainnya membayar dalam bentuk yang sama.¹³⁵ Bagi penduduk Tabuk ditetapkan bahwa setiap penduduk laki-laki dan dewasa diwajibkan membayar satu *dinar* setiap tahun. Pada saat yang lain ada pula *jizyah* yang dibayarkan dalam bentuk baju.¹³⁶

Pada masa Abu Bakar, sebagian besar *jizyah* dipungut dalam bentuk uang karena daerah-daerah baru yang dibuka oleh Islam telah memakai uang sebagai alat tukar menukar, atau sebagian besar harta mereka tersimpan dalam bentuk mata uang. Hal ini berbeda dengan keadaan harta orang-orang Arab yang umumnya masih berbentuk ternak dan lain-lainnya serta kebanyakan mereka belum mengenal mata uang.¹³⁷ Sedangkan pada masa 'Umar, perkembangan terakhir dari peraturan *jizyah* adalah sejumlah 48 *dirham* untuk orang kaya, sedangkan untuk orang-orang menengah dan fakir yang mempunyai pekerjaan masing-masing 24 dan 12 *dirham* setiap

¹³⁴ Al-Balādhurī, *Futuh al-Buldan*, vol. I, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, t.t.), 71.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Badawī Abd al-Latīf, *al-Nizām al-Malī al-Muqarran fī al-Islām*, (t.t.: al-Majlis al-'A'la li al-Shu'un al-Islamiyah, 1962), 25.

¹³⁷ 'Aliyy 'Abd al-Rasūl, *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah fī al-Islām*, (T.t.: Dar al-Fikr 'Arabi, t.t.), 249.

tahun.¹³⁸ Pada masa Umar ini *jizyah* tidak diharuskan dibayar sekaligus melainkan boleh diangsur perbulan. Dengan demikian setiap bulan orang yang kaya mengangsur 4 *dirham*, orang menengah 2 *dirham* sedang bagi para fakir yang mempunyai pekerjaan setiap bulannya mengangsur 1 *dirham*.¹³⁹

Bila disimpulkan, *jizyah* yang pernah ditetapkan pada masa Nabi sampai pada masa-masa selanjutnya adalah bermacam-macam bentuknya yang meliputi emas dan perak, kayu bakar, hasil buah-buahan dan ternak, baju besi, perhiasan dan uang. Jadi, memang dijumpai aneka ragam bentuk dan jumlah pungutan *jizyah*.¹⁴⁰ Oleh karena itu sebagaimana pendapat Imam Malik bentuk dan jumlah *jizyah* diserahkan kepada kebijaksanaan para pejabat negara, agar disesuaikan dengan kemampuan wajib bayarnya, yakni tidak boleh membebani seseorang di luar batas kemampuannya.¹⁴¹

Di luar *jizyah*, pemerintah Islam zaman lalu juga tercatat memberikan kewajiban lain, misalnya mewajibkan non-Muslim menjamu Muslim yang datang ke wilayah mereka, yakni seperti apa yang sudah diadatkan oleh bangsa Arab ketika ada tamu berkunjung. Ahmad bin Qays memberitakan bahwa Umar r.a. mensyaratkan agar *ahl al-dhimmah* menjamu Muslim yang datang bertamu

¹³⁸ Abd al-Latif, *al-Nizām al-Malī al-Muqārān fī al-Islām*, 25.

¹³⁹ Zaydan, *Tarīkh al-Tamaddun al-Islāmī*, 228-229.

¹⁴⁰ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 150.

¹⁴¹ Ibid., 151.

selama satu hari satu malam, memperbaiki jembatan-jembatan dan kalau ada Muslim yang terbunuh di daerah mereka, merekalah yang menanggung *diyat* (denda)nya. Aslam meriwayatkan, bahwa para wajib bayar *jizyah* dari Sham menemui Umar bin Al Khaṭṭab dan mengadu bahwa orang-orang Islam yang singgah di tempat mereka selalu minta disembelih k kambing dan ayam untuk hidangan. Maka Umar pun menjawab, "Jamulah mereka dengan apa yang biasa kamu makan sehari-hari dan tidak usah kamu tambah."

Kemudahan (keringanan) dalam pembayaran *jizyah* itu memang dengan langsung sudah ditegaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat beliau:

عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاً دماً أو انتقصه
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم
القيامة (رواه أبو داود). ١٤٢

Artinya :

Dari para sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh sejumlah anak-anak mereka Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴² Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 152.

"Barangsiapa yang berbuat semena-mena terhadap *mu'abid* (*dhimmi*) mengurangi haknya, memberi beban yang berada di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu miliknya tanpa adanya kerelaan maka aku sendirilah yang akan menjadi lawannya nanti pada hari kiyamat."

Jizyah tidak dibebankan kepada semua *dhimmi* melainkan hanya orang laki-laki, cakap dan merdeka.¹⁴³ Wanita, anak-anak, budak dan orang gila tidak wajib. Begitu juga non-Muslim yang miskin, tidak kuat bekerja, orang buta atau dalam keadaan sulit, berpenyakit. Para pendeta (*rahib*) tidak diwajibkan membayar *jizyah* terkecuali kalau dia kaya.¹⁴⁴

C. Gugurnya *jizyah*

Dhimmi yang sudah masuk Islam tidak diwajibkan lagi membayar *jizyah* berdasarkan hadis yang dibawa oleh Ibnu 'Abbas :

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية (رواه أحمد).^{١٤٥}

¹⁴³ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 148.

¹⁴⁴ Ibid., 149.

¹⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, vol. I, (Beirut: Dar Şadir, t.t.), 223.

Artinya :

Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seorang Muslim tidak wajib membayar *jizyah*."

Kemudian apakah pembebanan *jizyah* itu mengandung unsur penghinaan atau hukuman? Pertanyaan ini muncul karena ada pendapat bahwa pembebanan tersebut mengandung arti bahwa wajib bayarnya dianggap hina dan pajak itu sebagai hukuman bagi dia. Dalam ayat mengenai *jizyah* memang ada kata "صاغرون" yang secara harfiah diterjemahkan "kecil". Penafsiran dari kata tersebut yang benar adalah "dalam keadaan tunduk" kepada hukum Islam yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi tidak diberi pengertian dengan "dalam keadaan hina dina".¹⁴⁶ Dengan demikian terjemahan yang benar dari ayat tersebut (surat al-Taubah ayat 29) beserta dengan teksnya adalah :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن
يد ومم صغرون (التوبة: ٢٩)

Artinya :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka

¹⁴⁶ 'Abd al-Laṭīf, *al-Niẓām al-Malī al-Muqāran*, 32.

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul- Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) diberi al-Kitab sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."¹⁴⁷

Jizyah berkedudukan sebagai imbalan bagi perlindungan keamanan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka dari segala serangan yang datang dari manapun. Dan kalau ternyata kaum Muslimin tidak lagi kuasa melindungi mereka terhadap bahaya dari luar, *jizyah* mereka akan dikembalikan seperti yang pernah terjadi berikut. Jenderal Arab Abu 'Ubaydah mengirim surat kepada para gubernur kota-kota Siria yang mereka kuasai, agar mereka mengembalikan semua *jizyah* yang telah dipungut dari warga kota setempat. Di samping itu dia mengumumkan pula kepada penduduk sebagai berikut:

"Kami mengembalikan kepada saudara-saudara semua uang yang kami pungut, karena kami mendengar informasi bahwa musuh akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap kami. Persetujuan yang kita tentukan mengharuskan kami melindungi saudara-saudara, tetapi dalam keadaan seperti ini kami tidak berdaya, maka kami kembalikan semua apa yang telah kami ambil dari saudara-saudara. Tetapi apabila nantinya kami

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

menang, maka perjanjian semula itu tetap kami anggap berlaku."¹⁴⁸

Lebih dari pada itu *jizyah* itu juga berarti pembebasan dari kewajiban mamanggul senjata untuk membela negara. Oleh karena itu kalau mereka menggabungkan diri masuk tentara ikut mempertahankan negara dan berada di pihak kaum Muslimin atau mereka rela untuk membela jiwa dan harta mereka sendiri, mereka akan dibebaskan dari pungutan *jizyah*. Bahkan bukan hanya itu saja, tenaga mereka itupun akan diberi imbalan sepantasnya karena mereka telah mau membantu kaum Muslimin.¹⁴⁹

Perjanjian antara Suwayd bin Marqam salah satu panglima perang Umar r.a. dengan penduduk Jurjan setelah ditaklukkan berbunyi: "Kamu sekalian berhak mendapatkan perlindungan dari kami dan kami wajib membela kalian. Barangsiapa yang kami minta pertolongan tenaganya, maka dia akan mendapatkan imbalan atas pertolongan yang telah ia berikan itu."¹⁵⁰ Demikian juga perjanjian yang telah disepakati antara Habib bin Maslamah al-Fahri penguasa Antokia, yang dalam hal ini menjadi perunding utusan Abu 'Ubaydah, dengan suku al-Jurajimah (suku Kristen di dekat Antokia), bahwa orang-orang Kristen itu akan berperang

¹⁴⁸ T.W. Arnold, *Sejarah Da'wah Islam*, terj. H.A. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1979), 56.

¹⁴⁹ 'Abd al-Latif, *al-Nizām al-Malī al-Muqarān*, 31.

¹⁵⁰ Ibid., 32.

di pihak kaum Muslimin serta membela mereka dengan syarat mereka dibebaskan dari pembayaran *jizyah*.¹⁵¹

Kecondongan kepada perdamaian yang menjadi watak Islam telah menjadi hiasan yang abadi pada lembaran-lembaran sejarahnya, sehingga terjadi pula peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rasa simpati dari para pengikut agama lain terhadap kaum Muslimin. Peristiwa-peristiwa yang mengesankan tersebut antara lain sebagaimana yang telah ditulis oleh T.W. Arnold. Ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu 'Ubaydah mencapai lembah Jordan, penduduk Kristen setempat menulis surat kepadanya yang berbunyi:

"Saudara-saudara kami kaum Muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih bersikap kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintahan Islam lebih baik daripada pemerintahan Byzantium yang telah merampok harta dan rumah-rumah kami."¹⁵²

T.W. Arnold menulis lagi, bahwa sehubungan dengan perintah pengembalian *jizyah* oleh Abu 'Ubaydah di atas orang-orang Kristen kemudian mendoakan keselamatan para pemimpin Islam:

¹⁵¹ Al-Balādhurī, *Futuh al-Buldan*, 189.

¹⁵² Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, 50.

"Semoga Tuhan memberkahi kalian untuk memimpin kami kembali dengan memenangkan pertempuran melawan tentara Romawi, karena apabila mereka yang menang, maka mereka tidak akan mengembalikan sesuatu kepada kami, malah sebaliknya akan mengambil segala-galanya dari kami."¹⁵³

Maka dapatlah dipahami bahwa Islam tidak memiliki ajaran yang mengajarkan sikap agresif terhadap non-Muslim. Islam menekankan kebebasan untuk beragama dan menjunjung tinggi hasrat untuk hidup berdampingan secara damai. Kewajiban membayar *jizyah* bagi non-Muslim haruslah dipahami sebagai kewajiban sebagai warganegara yang dalam praktek sejarahnya lebih ringan bila dibandingkan dengan kewajiban kaum Muslimin sendiri. Anehnya, ternyata banyak non-Muslim yang kemudian malahan memeluk Islam, padahal dengan masuk Islam, mereka bahkan harus membayar zakat yang ternyata lebih banyak jumlahnya dari pada uang pajak bila mereka masih memeluk agama mereka yang lama.¹⁵⁴

Kewajiban mereka membayar *jizyah* kiranya bisa dipahami, karena umat Islam diwajibkan membayar zakat yang dikeluarkan dari harta mereka, baik zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat hasil bumi dan lain sebagainya. Demikian juga kaum Muslimin diwajibkan membayar *kaffarat* dan *fidyah* karena meninggalkan ibadah tertentu

¹⁵³ Ibid., 57.

¹⁵⁴ Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Agama dalam Islam*, 250.

atau karena pelanggaran sumpah dan merusak puasa karena persetubuhan dan sebagainya.

Pembayaran pajak lain dikenakan dengan nama *kharaj*. Pembayaran *jizyah* oleh penduduk non-Muslim di atas adalah semacam pajak yang memang berdasar pada asas bahwa seseorang tidak beragama Islam. Ini terbukti dari keterangan di atas bahwa apabila seseorang masuk Islam, maka gugurlah kewajiban ini. Ada pendapat yang tentunya juga berdasarkan fakta sejarah bahwa warganegara non-Muslim di samping ia harus membayar *jizyah* diwajibkan pula membayar *kharaj* (pajak tanah).¹⁵⁵ Akan tetapi ternyata pula bahwa *kharaj* yang disebutkan itu adalah *kharaj* yang berkedudukan sebagai *jizyah*.¹⁵⁶ Dengan demikian satu-satunya pajak yang diwajibkan atas non-Muslim karena ketidak Islamannya adalah *jizyah* saja, sedangkan seperti *kharaj* yang mempunyai maksud “pajak tanah” serta pajak-pajak yang lainnya menurut pendapat penulis baik penduduk Muslim maupun non-Muslim mempunyai kewajiban yang sama, karena khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz pada masa pemerintahannya menetapkan bahwa semua tanah dikenai *kharaj* baik pemiliknya *dhimmi* ataupun orang Islam.¹⁵⁷ Jadi non-Muslim mungkin saja akan dibebani pajak-pajak yang lain di samping *kharaj* dan *jizyah*, kewajiban yang juga harus ditunaikan oleh kaum Muslimin sebagai warga negara.

¹⁵⁵ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), 75.

¹⁵⁶ Ibid., 69.

¹⁵⁷ Khadduri, *War and Peace*, 188.

Selanjutnya, hukum Islam telah mewajibkan *musta'min* secara umum, baik mereka sebagai penduduk ataupun bukan, untuk menjaga ketenteraman dan tata tertib umum. Misalnya, mereka dilarang menjadi mata-mata dan kalau terbukti menjadi agen rahasia musuh bisa dijatuhi hukuman mati.¹⁵⁸ Di dalam pergaulan mereka sehari-hari, di negara Islam telah ditentukan bahwa hukum pidana Islam untuk semua orang yang berada di dalam wilayah negara Islam tanpa memandang asal-usul mereka karena pada pokoknya hukum pidana adalah sebagai penjamin keamanan umum. Jadi, pada prinsipnya, setiap perbuatan yang menimbulkan kekacauan haruslah ditindak tanpa memandang siapa pelakunya. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli *fiqh* Islam, termasuk Abū Yusuf. Adapun Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa ada ketentuan khusus buat *musta'min*. *Musta'min* menurut Abū Ḥanīfah dihukum karena tindak pidana yang dilakukannya melanggar hak-hak manusia (*ḥaqq al-'ibād*) atau melanggar sesuatu yang hak manusia lebih dominan dibandingkan dengan hak Allah (*ḥaqq Allāh*). Adapun pelanggaran terhadap hak yang murni merupakan hak Allah seperti perzinahan atau yang hak Allah lebih dominan seperti pencurian, *musta'min* tidak dihukum. Alasan Abū Ḥanīfah adalah bahwa *musta'min* ketika masuk kawasan Islam baik sekedar berkunjung, misalnya sebagai pedagang, atau hendak berdiam sementara disyaratkan kesediaan untuk berkelakuan baik serta tidak

¹⁵⁸ Ṣābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 213.

melanggar mengganggu ketertiban bersama. Adapun bila ia melanggar hak Allah maka ia tidak dihukum, karena asas penjatuhan hukuman memerlukan adanya kekuasaan, sedangkan dalam hal ini tidak ada kekuasaan terhadap dia. Dia hanya bertempat tinggal sementara di kawasan Islam.¹⁵⁹

Akan tetapi pandangan Imam Abū Ḥanīfah ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dipakai pedoman oleh negara Islam dalam melaksanakan hukum Islam dan mencegah kemungkaran. Karena bagaimanapun juga penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hak Allah adalah untuk mencegah kekacauan, dan dengan sendirinya siapapun yang memasuki kawasan Islam haruslah menghormatinya. Adalah sangat janggal apabila *musta'min* masuk kawasan Islam kemudian ia mencuri atau berzina tapi ia tidak dipidana. Hal ini jelas merupakan ketidakadilan.¹⁶⁰ *Musta'min* tidak diwajibkan membayar pajak kecuali ia menanggalkan statusnya sebagai *musta'min* dan masuk menjadi *dhimmi*.¹⁶¹ Tetapi mungkin saja *musta'min* akan dikenakan pungutan atau pajak lain sesuai dengan kebutuhan negara. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭab ada pajak bagi mereka yang dinamakan '*ushur*'. Pajak ini memang tidak pernah diadakan pada masa-masa sebelumnya, yakni pada masa

¹⁵⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, (T.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 343-344.

¹⁶⁰ Khadduri, *War and Peace*, 166.

¹⁶¹ 'Abd al-Rasul, *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah fi a-Islam*, 261.

Rasulullah dan masa Abu Bakr. Kisah ditetapkannya 'ushur (yang secara harfiah berarti "sepersepuluh") dapat dituturkan secara ringkas bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari melihat bahwa orang-orang Islam ditarik pajak ketika mereka memasuki kawasan perang (kawasan musuh) karena membawa barang dagangan, ia menulis surat kepada Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab dan meminta pendapatnya tentang bagaimana pula memperlakukan pedagang-pedagang dari kawasan perang yang masuk berdagang di kawasan Islam. 'Umar r.a. menjawab, mereka juga harus ditarik pajak sebanyak yang dibayar oleh orang-orang Islam. Kemudian ditentukan peraturan berikutnya bahwa *dhimmi* juga dikenai pajak perdagangan sejumlah seperduapuluh dari seluruh aset barang dagangan dan bagi pedagang Muslim seperempatpuluh.¹⁶²

Perlu ditambahkan, tidak asal barang perdagangan dipungut pajak, melainkan dengan syarat: *Pertama*, aset dagangan itu mencapai jumlah minimal (*nisab*) yakni 20 *dinar* (20 *mithqal*) emas atau 200 *dirham* perak. *Kedua*, barang dagangan itu dibawa berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya.¹⁶³ Selanjutnya ditentukan bahwa pajak ini dipungut tiap tahun.¹⁶⁴

Dengan selesainya uraian tentang kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh non-Muslim maka yang berikut ini adalah pembahasan tentang hak-hak yang

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

harus diberikan oleh pemerintah Islam kepada penduduk non-Muslim apabila mereka telah melakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik.

D. Hak dan Kebebasan Dasar Penduduk non-Muslim

Pada pembahasan di atas sudah dijelaskan bahwa pada pokoknya Islam menyamakan antara Muslim dengan non-Muslim. Artinya hak dan kewajiban mereka pada dasarnya sama. Kaidah yang telah ditetapkan adalah:

هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم¹⁶⁵.

Artinya:

Hak mereka (non-Muslim) sama dengan hak kaum Muslimin, dan kewajiban mereka pun sama dengan kewajiban kaum Muslimin.

Akan tetapi sudah dijelaskan pula, menyamakan secara mutlak adalah tidak mungkin, karena pada dasarnya memang ada perbedaan.¹⁶⁶ Non-Muslim yang telah diakui oleh pemerintah Islam sebagai warga negara atau penduduknya adalah mereka yang telah memberikan janji setia dan janji untuk berkelakuan baik serta tidak berbuat sesuatu yang dipandang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian kaum Muslimin telah diberi izin bahkan diperintahkan untuk membalas

¹⁶⁵ Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, 344.

¹⁶⁶ Mutawalliyy, *Mabadi' Nigam al-Hukm fī al-Islām*, 395.

budi baik mereka itu berdasarkan ayat 8 surat al-Mumtahanah:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبْرُوهُمْ وَتَقْسُطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الْمُتَحَنَّةُ ٨)

Artinya :

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹⁶⁷

Perjanjian untuk menjadi *dhimmi* dan *musta'min* ini disertai dengan kesanggupan dari pemerintah Islam sebagai kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, hak milik dan kepercayaan mereka.¹⁶⁸ Sebagai contoh dari perlindungan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan penduduk Kristen Najran. Berikut ini cuplikan dari isinya:

"Mereka (orang-orang Kristen Najran) mendapat perlindungan dari Allah dan janji dari Muhammad Rasulullah bahwa mereka terjamin kehidupan, hak milik, tanah, peribadatan baik bagi yang berada di tempat maupun yang sedang bepergian keluarga, gereja mereka dan segala yang mereka miliki. Tak

¹⁶⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 924.

¹⁶⁸ Khadduri, *War and Peace*, 179.

satu pun dari uskup dan rahib yang akan dipindahkan dari gereja atau biara mereka dan tak ada satu pendeta pun yang akan dipaksa untuk meninggalkan cara hidup mereka sebagai pendeta. Hak-hak mereka tidak akan dikurangi maupun dilecehkan. Wilayah mereka tidak akan diduduki oleh tentara kaum Muslimin. Barangsiapa yang mencari keadilan, mereka akan mendapatkannya. Tidak akan ada penindasan dan tidak akan ada ketertindasan."¹⁶⁹

Maka dari itu pemenuhan perjanjian itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an ayat 1 Surat al-Ma'idah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian itu."¹⁷⁰

Kewajiban memenuhi perjanjian semacam yang dikutip di atas mengisyaratkan bahwa sektor-sektor yang dijamin itu adalah merupakan syarat-syarat yang vital bagi kesempurnaan kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Artinya, hanya dengan sektor-sektor itulah nilai kemanusiaan dari manusia benar-benar didudukkan pada kedudukan yang sebenarnya. Rincian selanjutnya yang akan diberikan dalam bagian lain dari buku ini akan di samping hal itu diberikan kepada kaum menjelaskan

¹⁶⁹Ibid.

¹⁷⁰Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

bahwa di samping hal itu diberikan Muslimin, juga diberikan kepada non-Muslim, atas dasar kesamaan martabat manusia.

1. Kebebasan Sipil

Apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan transaksi, obligasi, yang menjamin hak milik atas barang bergerak maupun barang tak-bergerak serta menjamin hak memanfaatkan apa yang ia miliki itu.¹⁷¹ Dalam hal ini, hak *dhimmi* untuk memiliki harta secara meyakinkan telah dijamin, bahkan (menurut madhab Hanafi) sekalipun hak milik atas minuman keras dan babi. Terhadap hak milik atas barang-barang haram ini telah ditentukan dengan istimewa bagi para pengikut suatu agama yang misalnya memiliki ajaran yang membolehkan hal-hal yang oleh Islam dipandang haram itu. Seorang Muslim yang menumpahkan minuman keras atau membunuh babi milik mereka wajib membayar ganti rugi. Akan tetapi jika sebaliknya mereka menumpahkan minuman keras atau membunuh babi milik orang Islam, mereka tidak wajib mengganti kerugian, sebab kedua barang tersebut dinilai sebagai harta bagi mereka sedang bagi orang Islam tidak.¹⁷² Maka jika hak milik atas barang-barang haram pun dijamin, apalagi atas barang-barang

¹⁷¹Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Muhammad Zain Hassan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 74-75.

¹⁷² Aliyy 'Abd al-Wahid Wafī, *al-Hurriyyah fī al-Islam*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967), 9.

yang tidak diharamkan. Nabi sendiri menghormati hak milik *dhimmi*. Şafwān, yang ketika itu belum memeluk agama Islam, diberitakan:

عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمناها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (رواه أحمد).¹⁷³

Artinya :

Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah s.a.w. meminjam beberapa buah baju besi padanya. Şafwān bertanya, "Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?" Rasulullah saw menjawab, "(Bukan), tetapi ini pinjam meminjam yang ada jaminannya." Şafwān berkata, "Kemudian sebagian dari baju besi itu hilang, dan Rasulullah bersedia menggantinya." Akhirnya Şafwān pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya sekarang lebih senang berada di dalam Islam." (HR Ahmad).

Bagi *musta'min* yang meskipun berkedudukan sebagai orang asing, hukum Islam pun menghormati hak

¹⁷³ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Ḥanbal*, vol. III, (Beirut: Daru Şadir, t.t.), hal. 401.

milik mereka. Harta yang dikumpulkannya di negara Islam tetap menjadi miliknya, dan hak miliknya tidak hilang, sekalipun ia kembali ke negerinya yang sedang memerangi negara Islam itu (*dar al-harb*), bahkan sekalipun ia ikut menyandang senjata memerangi negara Islam.¹⁷⁴

Bagi orang asing mungkin juga bisa diadakan pembatasan hak milik dan hak-hak lainnya. Seperti di Indonesia, orang-orang asing tidak mempunyai hak milik tanah, hak guna usaha, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan, sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria pasal 21 ayat (1), pasal 30 ayat (1) a, dan pasal 46 ayat (1).¹⁷⁵ Karena pada pokoknya menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, hanya warganegara Indonesia sajalah yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.¹⁷⁶ Demikian pula, dalam ketentuan Islam, adanya pembatasan seperti itu adalah atas pertimbangan-pertimbangan segi pengutamaan warganegara di atas orang asing, bukan dari sebab perbedaan agama. Karena kalau mereka mau menjadi warga negara (*dhimmi*), tidak perlu harus masuk Islam, pembatasan hak-hak seperti ini

¹⁷⁴ Abu Zahrah, *Hubungan Internasional dalam Islam*, 82-83.

¹⁷⁵ Abdurrahman SH., *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kebutuhan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan*, (Bandung: Alumni, 1979), 23, 25 dan 29.

¹⁷⁶ *Ibid.*, 19.

- jikalau memang ada - menjadi hilang meskipun mereka tidak masuk Islam. Hak mereka sama dengan Muslim.

2. Kebebasan Bertempat Tinggal

Pada dasarnya, dalam konsep *fiqh siyasah* klasik, negara-negara Islam semuanya dipandang satu wilayah, oleh karena itu baik Muslim maupun *dhimmi* tidak boleh dihalangi bila mereka hendak masuk ke suatu negeri Islam yang lain walaupun bukan negeri orang itu sendiri.¹⁷⁷ Jaminan atas rumah atau tempat tinggal mereka dijamin oleh ketentuan umum, bahwa rumah siapa pun tidak boleh dimasuki tanpa izin dari pemiliknya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat al-Nur ayat 27. Ayat ini bersifat umum, mencakup baik rumah orang Muslim maupun rumah non-Muslim, karena - sebagaimana yang telah diterangkan - kedua golongan ini dipersamakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى
أُмْلَهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور ٢٧)

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

¹⁷⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 42.

Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat."¹⁷⁸

3. Kebebasan Beragama

Setiap pemeluk Islam harus meyakini bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Tidak sahlah keislaman seseorang kalau hal ini tidak diyakininya. Sekalipun begitu, umat Islam dilarang memaksakan kebenaran ini kepada mereka yang tidak mau menerimanya. Islam ingin agar semua orang yang memeluknya benar-benar berdasar kepada keyakinan bahwa selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Sebab menurut Islam kebenaran itu sudah jelas, tinggal lagi terserah kepada manusia untuk mengikutinya atau tidak. Alasan memilih Islam haruslah berdasar kepada pemikiran yang sehat. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة ٢٥٦)

Artinya :

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah."¹⁷⁹

Rasulullah SAW dalam menyeru manusia kepada Islam, oleh Allah telah dibekali kesadaran bahwa sesungguhnya beliau hanyalah bertugas sebagai

¹⁷⁸ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 547.

¹⁷⁹ Ibid., 63.

penyampai saja, dan tidak dituntut lebih dari itu. Selama penyampaian itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka selesailah tugas beliau. Adapun apakah manusia mau beriman atau tidak hal itu bukan tanggung jawab beliau.

Firman Allah Surat al-Nahl ayat 82:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ (النحل ٨٢)

Artinya :

"Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."¹⁸⁰

Oleh karena itu, Rasulullah sendiripun tidak dibenarkan memaksa manusia supaya beriman. Beliau diberi pengatan oleh Allah dengan satu ayat yang berbentuk pertanyaan namun bermakna larangan, yakni surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْذِبُ (يونس ٩٩)

يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس ٩٩)

Artinya :

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini

¹⁸⁰ Ibid., 414.

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"¹⁸¹

Jangankan memaksa orang lain, memaksa istri sendiri untuk masuk Islam pun dilarang bagi suami. Padahal Islam menjadikan suami pemimpin bagi istrinya di dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, tetapi seorang Muslim yang memperistri wanita ahli kitab tidak boleh memaksa meninggalkan agamanya, bahkan ia tidak boleh mencegah istrinya menjalankan ajaran agamanya. Bahkan lagi, menurut sebagian madhab di dalam hukum Islam, seyogyanya dia mengantarkan istrinya untuk pergi menjalankan ibadah di gereja atau synagogue apabila hal itu dikehendaki oleh istrinya.¹⁸²

Berkenaan dengan pembahasan mengenai kebebasan memeluk agama, ada dua pembahasan penting, yaitu Islam dan perang serta Islam dan orang-orang murtad.

a. Islam dan Perang

Hukum Islam telah mendahului pendapat cendekiawan manapun di dalam mengelaborasi ajaran kesopanan ke dalam tatakrama perang. Islam mengklasifikasikan perang menjadi perang yang dibenarkan dan perang yang dilarang, menjadi pelopor di dalam menentukan keharusan pengumuman pernyataan perang dan peringatan terlebih dahulu, serta melarang

¹⁸¹ Ibid., 322.

¹⁸² Wafī, *al-Hurriyyah*, 61.

perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam peperangan.¹⁸³ Hanya dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri sajalah peperangan dibenarkan oleh Islam, dan kalau lawan cenderung untuk berdamai maka perdamaian itu akan disambut dengan tangan terbuka.

Firman Allah surat al-Anfal ayat 61:

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مُوَسِّعٌ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(الأنفال ٦١)

Artinya :

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁸⁴

Dalam hal ini ada julukan yang diberikan kepada Islam sebagai "agama pedang". Pernyataan ini benar adanya kalau yang dimaksudkan adalah bahwa Islam adalah agama yang mewajibkan jihad, yang sebagian dari jihad itu dengan jalan peperangan (pedang). Akan tetapi pernyataan tersebut sama sekali salah kalau yang dimaksudkan adalah bahwa Islam itu tersebar dengan pedang atau memakai jalan kekerasan.¹⁸⁵ Tuduhan bahwa kaum Muslimin biasa memaksa orang lain masuk Islam

¹⁸³ 'Aliyy Mansūr, *al-Sharī'ah al-Islāmīyah Wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm*, 235.

¹⁸⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 271.

¹⁸⁵ 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Ḥaqā'iq al-Islam wa Abaṭil Khusūmih*, (T.t.: Dār al-'Ilm, 1966) 211.

dengan cara kekerasan telah banyak dibantah oleh para ahli antara lain oleh penulis besar dari Barat Thomas K. yang menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai contoh kepahlawanan seorang Nabi dengan mengatakan bahwa kalau dikatakan Muhammad itu mempergunakan pedang agar seruannya kepada Islam diterima orang, jelaslah hal itu tidak bisa diterima oleh akal, karena tidak mungkin dia yang hanya seorang itu mengangkat pedang, memaksa orang yang begitu banyak untuk menerima seruan Islam. Hijrah ke Ethiopia sebanyak dua kali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi para pemeluk Islam dan juga hijrah ke Madinah adalah cerminan dari kenyataan bahwa sejak pertama kali Islam lahir justru non-Muslimlah yang memulai menyatakan perang. Kaum Muslimin justru sudah dimusuhi ketika mereka sama sekali tidak memiliki daya buat melawan.

Dengan mempelajari Kitab Suci al-Qur'an, maka perang dalam Islam hanyalah untuk beberapa sebab, yaitu untuk membela diri, membela agama, membela mereka yang teraniaya¹⁸⁶ dan menjamin kelancaran dakwah jangan sampai ada pihak-pihak yang menghalangi orang-orang yang hendak masuk Islam.¹⁸⁷ Selanjutnya untuk lebih memperdalam penjelasan tentang satu persatu sebab-sebab peperangan tersebut di atas bisa ditempuh dengan mempelajari sejarah Islam khususnya mengenai

¹⁸⁶ A. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imamu al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 390.

¹⁸⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. I, terj. Muchtar Yahya, (Jakarta: Jayamurni, t.t.), 111.

sebab-sebab terjadinya peperangan demi peperangan antara Muslimin dengan non-Muslimin. Petunjuk umum dari Rasulullah ketika memberangkatkan pasukan ke medan perang adalah sebagai berikut:

- Bertaqwalah kepada Allah, berbuatlah baik, jangan berkhianat dan penuhilah janji.
- Apabila berhadapan dengan musuh dari orang-orang musyrik, tawarkan kepada mereka tiga hal, apabila mereka menerima salah satunya, maka cukuplah:
 - Pertama ajaklah mereka masuk Islam, bila mereka menerima tawaran tersebut terimalah mereka kemudian ajaklah mereka hijrah, bila mereka menolak untuk berhijrah katakanlah kepada mereka bahwa mereka tergolong Muslim Makkah yang tidak berhak menerima pampasan perang.
 - Bila mereka tidak mau masuk Islam, suruhlah mereka membayar *jizyah* (dengan mengadakan *'aqd dhimmah* yaitu jaminan perlindungan keamanan bagi jiwa dan hartanya).
 - Bila tidak mau membayar *jizyah* dengan mengadakan *'aqd dhimmah*, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.
- Tat kala kamu mengepung kubu pertahanan musuh, jika mereka yang berada di dalamnya meminta

perlindungan dan perdamaian, maka penuhilah permintaan mereka itu dan jaminlah keamanan mereka.¹⁸⁸

Semua ini adalah sebagai upaya untuk mengelakkan peperangan yang oleh Allah sangat dibenci. Ayat al-Qur'an yang akan disebutkan berikut ini berisi izin untuk mengadakan peperangan. Akan tetapi di dalam ayat tersebut kata "perang" sendiri malah tidak disebutkan. Ini bisa ditafsirkan bahwa Allah membenci peperangan, sehingga menyebutkannya pun tidak berkenan.¹⁸⁹ Ayat tersebut adalah ayat 39 dan 40 Surat al-Hajj:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس
بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم
الله كثيرا ولنصرن الله من ينصره وإن الله لقوى عزيز (الحج ٣٩-٤٠)

Artinya :

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang

¹⁸⁸ Al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, vol. VII, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, al-Ḥalabī, t.t.), 261.

¹⁸⁹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. I, 109.

yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.¹⁹⁰

Penjelasan itu pula menunjukkan bahwa sebelum peperangan terjadi, kaum Muslimin selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada musuhnya, artinya tidak dilaksanakan dengan tiba-tiba dan harus tetap tidak meninggalkan rasa belas kasihan. Hadis-hadis Nabi berikut ini memberikan ketentuan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam peperangan.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا

¹⁹⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 518.

صغيرا، ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا (إن الله يحب المحسنين) (رواه أبو داود).^{١٩١}

Artinya :

Dari Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Berangkatlah dengan asma Allah dan dengan berperang pada agama Rasulullah. Janganlah kamu membunuh orang yang sudah sangat tua, anak-anak kecil, wanita dan penuhilah janji. Kumpulkanlah rampasan perangmu serta berbuatlah kebaikan. (Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik)." (H.R. Abū Dāwud).

Demikian juga dilarang menebang (memotong dengan maksud merusak) pepohonan serta dilarang menghancurkan bangunan.

عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا إلى شام فخرج ميمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع. فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا مرما، ولا تقطع شجرا

¹⁹¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, 36.

مثمرا ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لماكله ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه، ولا تغلل، ولا تحجن. (رواه الامام مالك فى الموطأ).¹⁹²

Artinya :

Dari Yahyā bin Saʿīd, Abū Bakr mengirim tentara ke Shām (Syuriah), kemudian keluarlah ia berjalan bersama Yazīd bin Abī Sufyān, ketika itu Yazīd menjadi gubernur dari salah satu kawasan itu. Abū Bakr berkata, "Aku wasiatkan kepadamu sepuluh hal, yakni janganlah kalian bunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah sangat tua, janganlah kau tebang pohon yang berbuah, jangan kau robohkan bangunan, janganlah kau bunuh kambing dan unta kecuali untuk sekedar dimakan, janganlah kau binasakan pohon kurma dan jangan engkau bakar, jangan berkhianat serta sekali lagi jangan berkhianat. (H.R. Malik).

Demikian juga orang-orang menyendiri untuk beribadah tidak boleh dibunuh.

عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا لله تقاتلون فى سبيله من كفر بالله ولا تغدروا

¹⁹² Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, vol. II, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah-'Isa al-Babi al-Halabi wa Shurkah, 1951), 447-448.

وتغلوا وتمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع . (رواه أحمد) .^{١٩٣}

Artinya:

Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah s.a.w. apabila mengirimkan tentaranya selalu bersabda, "Berangkatlah hanya karena Allah dan berperangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepadaNya, jangan berkhianat, jangan mencincang-cincang tubuh musuh, janganlah membunuh kanak-kanak serta janganlah kau bunuh para biarawan." (H.R. Ahmad).

Penyiksaan juga dilarang dilakukan:

عن حمزة الاسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال : فخرجت فيها وقال : إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال : إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار . (رواه أبوداود) .^{١٩٤}

Artinya :

Hamzah al-Aslami berkata, "Ketika Rasulullah s.a.w. mengangkatnya sebagai panglima perang, tatkala

¹⁹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. I, 300.

¹⁹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 50.

sudah siap untuk berangkat beliau bersabda, "Apabila engkau berjumpa dengan si Fulan maka bakarlah dia." Kemudian Hamzah beranjak tempat lalu Rasulullah memanggilnya lagi dan dia kembali kepada beliau dan bersabdalah beliau, "Apabila kamu berjumpa dengan si Fulan, maka bunuhlah dia dan jangan kau bakar, karena hanya Tuhannya api yang boleh menyiksa dengan api."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam memastikan ditegakkannya etika di dalam perang. Konflik dengan kekerasan ini tidak boleh dilakukan dengan membabi buta sehingga menimbulkan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu dilarang:

- Membunuh anak-anak, wanita, orang yang sangat tua dan para rahib, karena mereka biasanya tidak membantu musuh kaum Muslimin di dalam peperangan.
- Membunuh ternak dan hewan-hewan dengan maksud merusak. Demikian juga tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh dibinasakan.
- Merusak bangunan.
- Menyiksa musuh, kecuali kalau musuh memulai terlebih dahulu sedang kaum Muslimin hanya membalas perbuatan mereka saja, meskipun sekali tempo memaafkan dipandang lebih baik.

- Mengkhianati perjanjian.

Di dalam peperangan sudah umum hal-hal yang tidak terhindarkan, seperti terbunuhnya wanita, anak-anak serta orang-orang lain yang semestinya tidak boleh dibunuh, misalnya ketika di dalam suatu tempat perlindungan laki-laki, wanita dan anak-anak bercampur menjadi satu sehingga sulit sekali dibedakan. Ada riwayat bahwa Rasulullah pernah tidak mempersalahkan siapapun dalam kasus seperti itu ketika terjadi wanita dan anak-anak terbunuh.

عن الصعب بن جثامة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الذرارى من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرا ربهيم فقال : مم
منهم (رواه مسلم).^{١٩٥}

Artinya :

Dari al-Ṣa'b bin Jaththamah, Nabi Muhammad s.a.w. ditanyai tentang kanak-kanak keturunan musyrik yang dijumpai pada waktu malam (bersama-sama orang dewasa atau dalam keadaan lain yang menyebabkan tidak bisa dikenali) yang kemudian baik wanita maupun anak-anak mereka mendapat serangan, maka beliau menjawab, "Wanita dan anak-

¹⁹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. II, (Kairo: al-Mashhad al-Ḥusaynī, t.t.), 73.

anak itu termasuk mereka yang diserang (musyrik) itu." (H.R. Muslim).

Rasulullah juga pernah menyuruh membunuh orang musyrik yang sudah tua, karena ia mengambil peranan di dalam peperangan walaupun secara tidak langsung.¹⁹⁶

عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا
شيخ المشركين واستحيوا شرخهم (رواه أحمد)¹⁹⁷

Artinya :

Dari Samrah bin Jandab, Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Bunuhlah orang-orang musyrik yang sudah tua dan
jangan kamu bunuh pemuda-pemudanya."

Dalam hal pepohonan dan bangunan, kalau penghancurannya memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan demi keselamatan umat Islam, artinya tidak ada jalan lain kecuali dengan itu maka hal itu tentu saja harus dilakukan.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق
(رواه مسلم).¹⁹⁸

¹⁹⁶ Al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār*, 281.

¹⁹⁷ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. I, 13.

¹⁹⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4.

Artinya :

Ibn 'Umar berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. menebang pohon kurma Bani Naḍir dan mengadakan pembakaran."

b. Islam dan Orang-Orang Murtad

Murtad menurut istilah para ahli hukum Islam adalah orang yang keluar dari agama Islam setelah memeluknya. Istilah ini sendiri berasal dari kata dasar *radda* yang artinya "kembali", seakan melukiskan mereka yang murtad itu sebagai orang yang telah surut ke belakang sesudah maju menggapai petunjuk.¹⁹⁹ Hukuman orang murtad menurut hukum Islam adalah hukuman mati. Hal ini berdasarkan hadis dari Ikrimah bahwa Ibn 'Abbās berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barangsiapa yang menukar agama (Islam) nya maka bunuhlah dia" Teks asli dari hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه.²⁰⁰

Bagaimanapun juga hukuman ini adalah hukuman yang berat dan mungkin mengundang pertanyaan, bukankah hukuman ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama di dalam Islam itu sendiri, yakni dengan mewajibkan Muslim tetap berada di dalam Islam

¹⁹⁹ Abū Zahrah, *al-Uqūbah*, 188.

²⁰⁰ Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, 440.

dan menghukum orang yang keluar, dan bukanlah Allah telah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة ٢٥٦)

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah."²⁰¹

Memang ayat tersebut berpengertian bahwa tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam, karena Islam ingin agar orang yang memasukinya berdasarkan kebebasan penuh dengan tumbuhnya kesadaran tentang kelebihan Islam bila dibandingkan dengan agama lain. Oleh karena itu ayat tersebut di atas disambung dengan :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة ٢٥٦)

Artinya:

"Karena itu siapa saja yang ingkar kepada *ṭaghūt* (setan dan apa saja yang disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada simpul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²⁰²

²⁰¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

²⁰² Ibid.

Dalam hal ini, Abū Zahrah mengemukakan pendapatnya. Barangsiapa yang telah masuk Islam berdasarkan kebebasan dan kesadaran berarti telah mendapatkan petunjuk, maka dari itu ia tidak mungkin dan tidak boleh melepaskannya, karena sebenarnya kenyataan tentang kebenaran Islam itu tidak akan pernah hilang dari sanubarinya. Oleh karena itu, patut diteliti kenapa dia sampai keluar dari Islam.²⁰³

Hukuman yang dijatuhkan pada orang tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan beragama, karena kebebasan berkepercayaan mewajibkan seseorang agar beriman kepada apa yang diucapkan dan diperbuatnya dengan jalan dia harus berpegang kepada alasan yang kuat ketika berpindah dari suatu kepercayaan ke kepercayaan yang lain. Islam tidak ingin orang berpindah agama dengan alasan yang tidak tulus, sehingga Islam membentengi masyarakat dari maksud-maksud yang tidak wajar, baik ketika masuk Islam maupun ketika keluar. Banyak kisah orang masuk Islam atas motivasi keuntungan materi, kepentingan politik, keuntungan lain seperti agar dibenarkan menceraikan istri atau menikah lagi. Mereka yang keluar dari Islam umumnya dari kalangan orang seperti ini, mereka keluar lagi dari Islam setelah tercapai maksudnya. Jarang sekali dijumpai orang yang semenjak kecil telah berada di dalam Islam kemudian ia keluar, kecuali karena keadaan yang ekstrem.

²⁰³ Abū Zahrah, *al-Uqūbah*, 101.

Maka jika Islam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang keluar dari Islam, hal itu justru dimaksudkan untuk mencegah tindakan mempermainkan agama dan untuk melindungi kebebasan berfikir dari pencemaran. Di dalam suatu pemerintahan berdasarkan Islam, masyarakat dibebaskan untuk menganut agama apa saja, termasuk bebas untuk tidak beragama. Ketika orang berfikir untuk masuk Islam, yang sama sekali bukan merupakan kewajiban, maka ia harus tahu konsekuensi dari keputusannya untuk keluar dari Islam, sehingga keputusan untuk masuk Islam diharapkan diambil dengan pertimbangan yang matang.²⁰⁴

4. Kebebasan Berfikir dan Mengutarakan Pendapat

Salah satu pengertian dari kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat adalah kebebasan orang untuk berfikir dalam bidang-bidang yang diminatinya sejauh yang dapat dijangkaunya dan kebebasan mempertahankan pendapatnya serta kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tadi melalui cara wajar yang ia sukai.²⁰⁵ Salah satu mukjizat yang dibawa al-Qur'an adalah bahwa al-Qur'an memuat pernyataan-pernyataan tentang ilmu pengetahuan. Pernyataan-pernyataan tersebut terlihat demikian sederhananya, tetapi kemudian ternyata dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Ayat-ayatnya banyak memuat hukum alam yang tidak disanggah kebenarannya

²⁰⁴ Ibid., 102.

²⁰⁵ Wāfi, *al-Hurriyah*, 77.

oleh ilmu pengetahuan modern.²⁰⁶ Secara implisit, pernyataan-pernyataan itu merangsang minat berfikir dari manusia untuk berfikir tentang diri dan lingkungannya serta soal-soal lain dan sekaligus menantang mereka untuk menguji kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut.

Salah seorang ahli yang tertarik menyambut tantangan al-Qur'an adalah seorang dokter ahli bedah berkebangsaan Perancis, Dr. Maurice Bucaille. Berdasarkan penyelidikannya melalui cara memperbandingkan al-Qur'an, Bibel serta sains modern berkesimpulan bahwa al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang sebenarnya dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir.²⁰⁷ Dia katakan juga bahwa tidak ada pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang dapat disangkal oleh sains.²⁰⁸ Berkali-kali ia mengulangi kesimpulan tersebut, seperti al-Qur'an tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern ini,²⁰⁹ dan bahwa, menurutnya, al-Qur'an berada di luar kritik sains modern.²¹⁰ Katanya lagi, penyelidikan dan

²⁰⁶ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Tinggi Da'wah Islam Indonesia, 1972), 29.

²⁰⁷ Maurice Bucaille, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, terj. H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 10.

²⁰⁸ Ibid., 19.

²⁰⁹ Ibid., 21.

²¹⁰ Ibid., 319.

penemuan-penemuan modern telah menunjukkan kebenaran al-Qur'an.²¹¹

Di satu pihak pernyataan al-Qur'an yang sering kelihatan remeh, tetapi jika diselidiki secara ilmiah dan ditinjau dengan hasil-hasil sains modern akan ternyata bahwa pernyataan-pernyataan itu menunjukkan hal-hal yang kemudian dibenarkan oleh sains,²¹² bahkan kitab suci ini bebas dari kesalahan-kesalahan ilmiah.²¹³

Islam tidak menghalangi siapa saja yang ingin menguji kebenaran-kebenaran yang telah dianggap mapan, bahkan dibuka kesempatan mempertanyakan dan menguji kebenaran isi al-Qur'an dari sudut bidang ilmu pengetahuan apa saja. Hal ini terbuka bagi siapapun, baik ia Muslim atau bukan.²¹⁴ Di dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai kalimat, "apakah kamu tidak berfikir?" dan kalimat-kalimat lain yang sama maksudnya.

Rasulullah menyebut orang yang tidak mempunyai pendapat sebagai orang yang lemah. Sejarah Islam penuh dengan peristiwa-peristiwa abadi, di saat itu para Muslim perseorangan maupun jama'ah menjalankan kebebasan berpendapat dengan segala keyakinan dan keberanian.²¹⁵ Khususnya mengenai kebebasan berfikir ilmiah, Rasulullah telah memberikan kemerdekaan sepenuhnya.

²¹¹ Ibid., 355.

²¹² Ibid., 366.

²¹³ Ibid., 367

²¹⁴ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 362.

²¹⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj. H.M.S. Agustjik, (Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1977), 70.

Dalam soal-soal keduniaan seperti ini Islam tidak memberikan perincian mengenai seluk beluknya, akan tetapi hal itu diserahkan kepada umat manusia agar mempergunakan daya fikirnya. Dirangsangnya manusia dengan umpan-umpan pertanyaan tentang penciptaan alam semesta dengan seluruh sistemnya. Diajaknya mereka berfikir mulai dari hal-hal yang ada pada tubuhnya sendiri sampai kepada hal-hal yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diperhatikan atau diketahuinya.

Kalau al-Qur'an mendorong manusia untuk berfikir, berarti pula al-Qur'an menghargai hasil dari daya fikir itu. Pernyataan yang diberikan oleh Dr. Maurice Bucaille di atas menunjukkan bahwa sebenarnya al-Qur'an dan ilmu pengetahuan adalah ibarat satu mata uang yang bermuka dua. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu di dunia Islam tidak pernah terjadi pengalaman seperti yang dialami oleh Galileo Galilei. Dia mendapatkan penemuan baru yang mengatakan bahwa bumi ini mengitari matahari dan bukan merupakan poros dari seluruh tata surya sebagaimana yang saat itu dipercayai. Oleh gereja ia dipaksa menarik pendapatnya dan ia dijatuhi hukuman tahanan selama 8 tahun di masa hidupnya.²¹⁶ Di dunia Islam tidak ada kaum cendekiawan yang menjadi korban pemaksaan dogma seperti di atas dan tidak pernah ada suara-suara yang menghendaki pemisahan agama dari ilmu pengetahuan.

²¹⁶ William Benton, *Encyclopaedia Britannica*, Vol. IX (London, 1965), 1088.

5. Kebebasan politik

Kebebasan politik berasal dari inti kesadaran bahwa rakyat adalah sumber kedaulatan negara.²¹⁷ Di antara hak-hak yang terpenting yang harus diberikan kepada rakyat sehingga benar-benar menjadi sumber kedaulatan adalah hak masing-masing individu baik secara langsung maupun tidak untuk memilih kepala negara, hak untuk mengoreksi dan meminta pertanggung jawaban kepala negara serta memberhentikannya.²¹⁸

Selanjutnya berdasarkan hadis Nabi yang telah dikutip pada pembahasan yang lalu tentang larangan perlakuan sewenang-wenang terhadap non-Muslim maka berarti mereka berhak memberikan teguran kepada pemerintah Islam khususnya manakala mereka merasa dirugikan. Oleh karena itu mereka berhak memilih wakil mereka untuk didudukkan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian anggota DPR negara Islam terdiri dari bermacam-macam organisasi maupun aliran bukan hanya perwakilan Muslim saja. Dengan adanya berbagai faham dalam organisasi itu barulah terwujud apa yang benar-benar dikatakan sebagai wakil rakyat yang akan memperjuangkan golongan-golongan rakyat yang diwakilinya.²¹⁹ Berdasarkan aturan seperti ini menjadilah

²¹⁷ Wafī, *al-Hurriyyah*, 91.

²¹⁸ Ibid.; Muhammad Hamidullah, *Pengantar Studi Islam*, terj. A. Chotib, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 220.

²¹⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1952), 64.

rakyat benar-benar sebagai sumber kekuatan dan kedaulatan.

6. Hak Memangku Jabatan Umum

Pada prinsipnya dua golongan Muslim dan non-Muslim sama-sama berhak memangku jabatan umum. Non-Muslim dibenarkan memangkunya di pemerintah Islam. Sejarah telah banyak membuktikan kenyataan ini, walaupun hal itu tidak terjadi pada masa Rasul dan Khalifah yang empat. Mungkin hal ini disebabkan keadaan waktu itu yang kaum Muslimin merasa belum aman sepenuhnya dari gangguan non-Muslim. Di dalam sejarah Islam telah terjadi bahwa ada *dhimmi* yang mengambil bagian di dalam pemerintahan negara hingga jabatan menteri, akan tetapi hanya terbatas pada kementerian *tanfidh* saja, bukan kementerian *tafwidh*.²²⁰

Kementerian *tanfidh* adalah kementerian yang hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan kepala negara. Kementerian ini menjembatani antara kepala negara dengan rakyat, tidak mempunyai kebijaksanaan sendiri. Adapun kementerian *tafwidh* adalah kementerian yang oleh kepala negara disertai wewenang dalam membuat kebijaksanaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.²²¹

Pembedaan kedua macam kementerian tersebut adalah sekedar pendapat ahli yang bersifat teoretis saja,

²²⁰ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 394-395.

²²¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Mesir: al-Halabi, 1973), 22 dan 25.

dan hampir-hampir tidak pernah terwujud dalam kenyataan di dalam sejarah ketatanegaraan Islam, kecuali mungkin hanya untuk masa yang singkat, yakni sebagian dari masa 'Abbāsiyah.²²² Pendapat seperti itu sudah bisa dipastikan tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan eksplisit dari *naṣṣ* al-Qur'an maupun hadis, tetapi pertimbangan rasional, *ijtihādī*, sebagaimana umumnya urusan kenegaraan dalam Islam. Akan tetapi pertimbangan rasional ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga merupakan hasil menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis yang dipandang relevan, di mana semangat dari sumber wahyu itu dipakai sebagai pedoman umum.

Ada ayat-ayat yang dapat mengilhami langkah pengetatan terhadap peranan non-Muslim di dalam roda pemerintahan kaum Muslimin, seperti ayat-ayat di bawah ini:

a. Ayat 28 surat Āli 'Imrān :

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكَمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالْإِلَهُ الْمَصِيرُ (آلِ

عمران ٢٨)

²²² Mutawalliyy, *Mabādī' Niẓām al-Hukm fī al-Islām*, 228-229.

Artinya :

"Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi *waliyy* dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali (karena siasat) memelihara diri dari sesuatu atau yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)."²²³

b. Ayat ke 57 surat al-Mā'idah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ مَزَاولِعًا مِنْ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة ٥٧)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil jadi pemimpin, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang kafir (musyrik). Dan bertaqwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."²²⁴

²²³ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

²²⁴ Ibid., 170.

Arti kata *awliya'* di dalam kedua ayat tersebut adalah penolong, pembantu,²²⁵ teman akrab, pemimpin dan pelindung.²²⁶ Ayat-ayat seperti ini pasti bisa ditafsirkan sebagai larangan memberikan jabatan penting kepada non-Muslim, terutama jika hubungan antara Muslim dan non-Muslim sedang dalam keadaan sulit. Namun jika hubungan itu sedang tidak bermasalah, maka bisa saja ayat-ayat ini dipandang tidak menjadi halangan bagi pemberian jabatan seperti itu kepada non-Muslim di tempat-tempat yang secara *common sense* tidak membahayakan.

Kenyataan sejarah memang menunjukkan perkembangan dalam soal ini. Keadaan pada zaman Nabi dan Khalifah yang empat serta zaman-zaman sesudahnya sebagaimana yang telah diterangkan terdapat adanya perkembangan di dalam soal kedudukan non-Muslim. Kalau pada kedua zaman yang pertama itu non-Muslim tidak mendapat jabatan apapun, maka lain halnya dengan kondisi mereka pada zaman sesudahnya. Pada masa Islam di Andalusia ada non-Muslim yang diangkat menjadi panglima perang. Pada zaman Khalifah Harun Rashid (Bani Umayyah) pernah terjadi adanya seorang Nasrani yang menjadi pengawas semua sekolah yang ada.²²⁷

²²⁵ Muḥammad 'Aliyy al-Sāyis, *Tafsir Āyāt al-Aḥkām*, Vol. II, (Mesir: Muḥammad 'Aliyy Ṣubayh, 1953), 5.

²²⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

²²⁷ Mutawalliyy, *Mabadi' Niḡam al-Hukm fi al-Islam*, 394.

Sudah dimaklumi bahwa negara akan membedakan mereka yang berstatus warganegara dan bukan. Begitu juga jika sebuah negara Islam membuat perbedaan hak antara Muslim dan non-Muslim. Sebagaimana di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya diberikan kepada orang yang sejak kelahirannya menjadi warganegara Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya. Dengan demikian mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak berhak memegang jabatan itu sekalipun mereka telah berkedudukan sebagai warganegara.

7. Persamaan di Muka Hukum

Perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah SAW dan penduduk Najran yang beragama Kristen yang juga telah dikutip di atas antara lain berbunyi "Barangsiapa yang mencari keadilan maka dia akan mendapatkannya. Tidak ada penindas dan tidak ada pihak yang tertindas."²²⁸ Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khattāb, seorang Yahudi menggugat 'Aliyy bin Abī Ṭālib (saudara sepupu Rasulullah yang beliau ambil menantu dan pada masa berikutnya menjadi khalifah yang keempat) di hadapan Umar. Setelah keduanya tampil di muka pengadilan beliau, beliau memanggil orang Yahudi itu dengan namanya sendiri, sedang Aliyy dipanggil dengan julukannya yakni Abā al-Ḥasan ("Bapak al-Hasan, anak

²²⁸ Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, 179.

pertama Aliyy bernama al-Ḥasan, suatu bentuk penghormatan). Maka marahlah ‘Aliyy. Umar bertanya kepada ‘Aliyy, “Apakah engkau tidak senang berurusan hukum dengan seorang Yahudi, yang kemudian di muka hukum kau dan dia berkedudukan sama?” Jawab Ali, “Aku marah justru karena engkau tidak menyamakan kedudukan kami. Engkau memanggil dia dengan namanya sendiri, sedangkan aku kau panggil dengan julukan kehormatanku.”²²⁹

8. Hak Mendapatkan Jaminan Sosial

Pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattāb, seorang Yahudi yang telah tua dan matanya telah rabun datang kepada beliau memohon perlindungan dengan kata-katanya, “*Jizyah*, kebutuhan dan usia lanjut.” Khalifah Umar memahami maksud permohonannya, lalu membawanya ke rumah kediaman Khalifah dan memenuhi segala kebutuhannya. Maka dipanggillah bendahara negara diperintahkannya, “Perhatikanlah nasib rakyat ini dan semua temannya! Kita tidak bersikap adil, kalau kita sudah makan masa mudanya (dengan memungut *jizyah*), tetapi kita lupakan zaman tuanya.”²³⁰

Perbendaharaan negara di dalam sejarah politik Islam ditangani oleh lembaga yang disebut dengan *bayt al-māl*, harfiah bermakna "rumah harta". Dana yang diperoleh oleh *bayt al-māl* berasal dari bermacam-macam sumber,

²²⁹ Mutawalliyy, *Mabadi' Niḡam al-Ḥukm fī al-Islām*, 393.

²³⁰ H. Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral*, 361.

zakat dan pajak serta rampasan perang. Jaminan sosial adalah salah satu fungsi dari pada *bayt al-māl* itu. Mereka yang berada dalam keadaan sulit akan dibantu. Islam menentukan golongan-golongan yang harus mendapat jaminan sosial untuk kehidupan yang layak.²³¹ Mereka adalah fakir miskin, orang sakit, buta, lumpuh, lanjut usia, gelandangan dan tawanan perang.²³²

Ada orang-orang lain yang tampaknya digolongkan kepada mereka yang terbelit persoalan ekonomi yang juga mendapatkan bantuan dari *bayt al-māl*, yaitu orang yang terlilit hutang, orang yang tidak mampu membayar denda bagi kejahatan yang dilakukannya, seperti pembunuhan tidak sengaja, orang yang kehabisan perbekalan di dalam perjalanan dan tamu.²³³ Jaminan sosial di atas bukan khusus untuk orang-orang fakir yang beragama Islam saja, akan tetapi semua orang yang berada di dalam perlindungan pemerintah Islam. Hak mereka terhadap perbendaharaan negara sama dengan hak orang Islam.²³⁴

Ringkasan

Keanekaragaman keyakinan yang dianut oleh manusia memang telah menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri pun dilarang oleh Allah untuk memaksa orang meninggalkan keyakinan mereka

²³¹ Musthafa As-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, terj. H.A. Malik Ahmad, (Jakarta: CV. Mulia, 1964), 51-52.

²³² Ibid., 52.

²³³ Ibid., 52-53.

²³⁴ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Musḥkilāt al-Faqr wa Kayf 'Alajāba al-Islam*, (T.t: Maktabah Wahbiyah, 1975), 117.

maupun masuk Islam. Ketentuan yang secara umum telah ditetapkan adalah bahwa non-Muslim tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Kewajiban yang ditetapkan untuk mereka harus masih dalam tingkat kewajaran dan hak-hak mereka harus selalu diberikan secara utuh.

Hukum Islam pada prinsipnya menyamakan warganegara Muslim dan warganegara non-Muslim (*dhimmi*) di dalam menetapkan kewajiban, hak dan kebebasan. Akan tetapi sebagaimana dimaklumi, persamaan yang sempurna tentulah tidak akan terjadi, karena pada hakikatnya kedua golongan itu memang berbeda. Semua warganegara wajib mematuhi hukum yang berlaku (hukum Islam). Adapun bagi non-Muslim, mereka tidak diwajibkan mematuhi hukum-hukum tersebut bila hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun perlu ditekankan bahwa semua warga negara diwajibkan menjaga ketenteraman umum sekalipun bagi *dhimmi* hal itu akan bertentangan dengan keyakinan mereka.

Di dalam perpajakan, *dhimmi* menurut hukum yang asal diwajibkan membayar *jizyah* (pajak kepala) sebagai imbalan dari jaminan keamanan yang diberikan negara dan imbalan bagi kebebasan mereka dari kewajiban militer untuk mempertahankan ideologi negara, karena kewajiban ini hanya dibebankan kepada kaum Muslimin

saja. *Jizyah* hanya diwajibkan kepada *dhimmi*⁻ laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta yang mampu membayarnya. Kewajiban orang asing (*musta'min*) dalam hubungannya dengan kepatuhan hukum yang berlaku dan pemeliharaan ketenteraman umum disamakan dengan *dhimmi*⁻. *Musta'min* tidak wajib membayar *jizyah*. Kewajiban-kewajiban selain dari apa yang telah disebutkan ditetapkan tanpa memandang keyakinan.

Selanjutnya Muslim dan *dhimmi*⁻ menikmati persamaan-persamaan dalam hal kebebasan sipil, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan beragama dan berkepercayaan, kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memegang jabatan umum. Persamaan di muka hukum dan hak mendapatkan jaminan sosial.

Perbedaan antara Muslim dan *dhimmi*⁻ terletak pada hak memegang jabatan umum, dengan ketentuan bahwa non-Muslim tidak berhak menduduki posisi yang dipandang berbahaya bagi Islam dan pemeluknya. Hak dan kebebasan *musta'min* sama dengan hak dan kebebasan yang dinikmati oleh *dhimmi*⁻ kecuali bila ditentukan lain dengan memperumbangkan kepentingan warganegara, bukan pertimbangan kepercayaan.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan buku adalah sebagai berikut:

1. Negara Islam pertama kali lahir ketika pada peristiwa hijrah, kaum Muslimin dari Makkah (*muhajirun*) bergabung dengan Muslimin Madinah (*anṣar*) serta hadirnya Rasulullah dan Abū Bakr di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin.
2. Prinsip-prinsip perundang-undangan negara Islam adalah permusyawaratan, keadilan, persamaan, kebebasan dan pertanggung jawaban penguasa. Perincian dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diserahkan kepada seluruh rakyat agar disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.
3. Non-Muslim dapat menjadi penduduk negara Islam baik sebagai warganegara (*dhimmi*) maupun sebagai orang asing (*musta'min*).
4. Kewajiban-kewajiban non-Muslim di dalam negara Islam adalah:
 - a. Baik *dhimmi* maupun *musta'min* wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku kecuali dalam hal-

hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Akan tetapi mereka wajib memelihara ketenteraman umum sekalipun kewajiban ini akan bertentangan dengan keyakinan mereka.

- b. Hukum yang asal mewajibkan *dhimmi* membayar *jizyah* (pajak kepala) sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan negara dan imbalan bagi kebebasan mereka dari kewajiban bela negara, kewajiban yang hanya dipikul oleh kaum Muslimin. *Jizyah* ini dibebankan hanya kepada *dhimmi* laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta yang mampu membayarnya.
 - c. *Musta'min* tidak wajib membayar *jizyah*.
 - d. Kewajiban-kewajiban lain ditetapkan tanpa memandang kepercayaan atau keimanan.
5. Hak dan kewajiban *dhimmi* sama dengan hak dan kebebasan Muslimin, hanya saja di dalam hak untuk memegang jabatan umum *dhimmi* tidak boleh menempati posisi yang dipandang berbahaya bagi Islam dan pemeluknya. Selain dari hal itu mereka sama dengan Muslim, sama-sama bebas dalam meraih tujuan materiil dan spiritual mereka.
 6. Hak dan kewajiban orang asing (*musta'min*) sama dengan hak dan kebebasan yang dinikmati oleh *dhimmi* kecuali bila ditentukan lain dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh warga negara, bukan pertimbangan keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rasūl, Aliyy. *Al-Mabādī’ al-Iqtisādīyah fī al-Islām*,
Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Abdur Rahman, SH., *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang
Masalah Agraria, Ketubanan, Pertambangan, Transmigrasi
dan Pengairan*. Bandung: Alumni, 1979.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Mesir. Muṣṭafā al-Babī al-
Ḥalabī, 1952.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Hubungan-Hubungan
Internasional dalam Islam*, terj. Muhammad Zein.
Jakarta Bulan Bintang, 1973.
- , *Al-Uqūbah*, T.t.: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah*. T.t.: Dār al-Fikr al-
‘Arabī, t.t.
- Aḥmad, Zainal Abidin. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut
Imam al-Ghazālī*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Konsepsi Negara Islam*, NV. Bandung: Al-Ma’arif,
1952.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*,
vol. I dan II. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

Al-'Aqqād, 'Abbās Maḥmūd. *Haqā'iq al-Islam wa Abaṭil Kbuṣumib*. T.t.: Dār al-'Ilm, 1996.

Arnold, T.W. *Sejarah Da'wah Islam*, terj. H.A. Nawawi Rambe. Jakarta: Wijaya, 1979.

Asad, Muhammad. *Masalah Kenegaraan Dalam Islam*, terj. Oemar Amin Hosein. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Bersama, t.t.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Perbandingan Madhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

-----, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.

-----, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

'Aṭiyyat Allāh, Aḥmad. *Al-Qāmūs al-Islāmī*, vol. I. Kairo: Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1963.

'Awdah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tasbri' al-Jina'i al-Islāmī*, Vol. I. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.t.

Badawī 'Abd al-Laṭīf. *Al-Niẓām al-Malī al-Muqāran fī al-Islām*. Kairo: al-Majlis al-'Alā li al-Shu'un al-Islāmīyah, 1962.

Al-Balādhuri, *Futuh al-Buldan*, vol. I. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, t.t.

Al-Barri, Zakariyya Aḥmad. *Abkām al-Awlad*. Kairo: al-Dār al-Qawmiyah, 1964.

- Benton, William. *Encyclopaedia Britannica*, vol. IX. London, 1965.
- Boisard, A. Marcel. *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bucaille, Maurice. *Bibel Qur'an dan Sains Modern*, terj. H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yamunu, 1970.
- Hasymi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Majelis Tinggi Da'wah Islam Indonesia, 1972.
- Manṣūr, 'Aliyy 'Aliyy. *Al-Shari'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn al-Dawli al-'Amm*. Kairo: Al-Majlis al-A'la li al-Shu-ūn al-Islāmiyah, 1971.
- Gibb, H.A.R. and Kramers, J.H. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Hamidullah, Muhammad. *Pengantar Studi Islam*, terj. A. Chatib. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hilmi, Maḥmūd. *Nizām al-Hukm al-Islāmi*. T.t. Dār al-Hudā, 1978.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

Ibn al-Athir. *Al-Kamil fi al-Tarikh*, vol. I. Beirut: Dar al-Şadir, 1965.

Ibn Hisham. *Al-Sirah al-Nabawiyah*, vol. II. Mesir: Muşafa al-Babi al-Halabi, t.t..

Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1960.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara FH. UI, 1980.

Malik bin Anas. *Al-Muwatta'*, vol. II. Kairo: Isā al-Babi al-Halabi, 1951.

Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, vol. X. Mesir: Muşafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Mesir: Muşafa al-Babi al-Halabi, 1973.

Mutawalliyy, 'Abd al-Ĥamid. *Al-Shari'ah al-Islamiyah ka Maşdar Asasi li al-Dustur*. Iskandariah: al-Ma'arif, t.t.

-----, *Mabadi' Niẓam al-Hukm fi al-Islam*. Iskandariah: al-Ma'arif, 1978.

Musa, Muĥammad Yūsuf. *Niẓam al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiyy, t.t.

Muslim. *Şahih Muslim*, vol. II. Kairo: al-Mashhad al-Ĥusayni, t.t.

- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Mushkilāt al-Faqr wa Kayf 'Alajābā al-Islām*. T.t.: Maktabah Wahbiyah, 1975.
- Quthb, Muhammad. *Islam, the Misunderstood Religion*. Kuwait: Dār al-Bayan, t.t.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, vol. XI. Kuwait: Dār al-Bayan, 1968.
- Al-Sāyis, Muḥammad 'Aliyy. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Mesir: Muḥammad 'Aliyy Ṣubayh, 1953.
- Al-Shawkānī. *Nayl al-Awtār*, vol. VII. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.
- Al-Siba'I, Musthafa. *Sistem Masyarakat Islam*, terj. A. Malik Ahmad. Jakarta: CV. Mulia, 1964.
- Soekarno. *Tatanegara Republik Indonesia*. Bukittinggi-Jakarta: NV. Nusantara, 1962.
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. I, terj. Muchtar Jahya. Jakarta: Jayamurni, t.t.
- , *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Muchtar Yahya. Surabaya: Salim Nabhan, t.t.
- Wafī, 'Aliyy Abd al-Wāḥid. *Al-Ḥurriyah fi al-Islām*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag

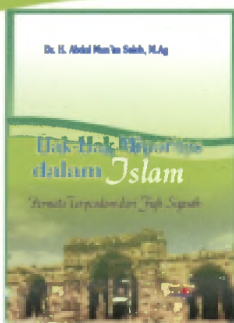
----- *Al-Musawab fi al-Islam*. Mesir: Dār al-Ma'arif,
1965.

Yamani, Ahmad Zaki. *Syari'at Islam yang Kekal dan
Persoalan Masa Kini*, terj. K.M.S. Agustjik. Jakarta:
Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1977.

Zaydan, Jarji. *Tāriḫ al-Tamaddun al-Islāmī*, vol I. Kairo:
Dār al-Hilāl, t.t.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO



Hak-Hak Minoritas dalam *Islam*

Permata Terpendam dari Fiqh Siyasah

... bahwa bagaimanapun juga menyamakan secara mutlak antara Muslim dengan *dhimmi* (non-Muslim) adalah tidak mungkin. Persamaan itu juga tidak terjadi di dalam negara manapun yang sejarah berdirinya dilatarbelakangi oleh ideologi atau faktor-faktor keagamaan tertentu. Di negara-negara Barat, walaupun tidak ada cekalan secara eksplisit, masyarakat yang menganut agama-agama ketimuran tidak dapat tampil dalam jabatan-jabatan publik, apalagi sampai mencapai puncak karier politik maupun pemerintahan. Hal ini sudah merupakan kenyataan, walaupun negara-negara itu dikenal sebagai negara-negara yang paling menghormati hak-hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap komunitas agama atau minoritas tertentu dalam batas-batas tertentu mungkin tidak terhindarkan. Negara-negara ini menganggap cukup dengan bersikap toleran kepada rakyatnya ...



Penerbit dan Percetakan
Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Telp. 031-72001887. 081249995403.

ISBN: 978-602-7567-63-4

